

SUMMARY RINGKASAN

INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN



Buku Serial Pengarusutamaan
Strategi Pengembangan
Koperasi dan UKM

#1

Buku Serial Pengarusutamaan
Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM
#Seri 1

SUMMARY/RINGKASAN

INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

Tim Penyusun Buku

Pengarah:

- Teten Masduki
- Arif Rahman Hakim
- Tb Fiki C Satari
- Riza Damanik

Ketua :

Noer Fauzi Rachman

Editor :

Noer Fauzi Rachman

Desain Cover dan Isi :

Wanara Studio

Penerbit & Redaksi :

Kementerian Koperasi dan UKM RI

Jl. H. R. Rasuna Said No.3-4 6,

Kota Jakarta Selatan 12940

Telp : (021) 5299 2777

Website : www.kemenkopukm.go.id

Konten :

Tim Penulis Buku Kompas

- Yoseptin T. Pratiwi
- Ika Nurul Syifaa

**Tim Biro Manajemen Kinerja Organisasi
dan SDM Aparatur**

- Ruli Nurdina Sari
- M. Irsan Ali
- Muhammad Rizky Dermawan

Foto dan dokumentasi :

Tim Biro Komunikasi dan TI

- Budi Mustopo
- Edi Yanto

Cetakan I

ISBN : 978-623-89357-0-3

ISBN : 978-623-89357-1-0 (PDF)

Sambutan

MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencakup lebih dari 99% pelaku usaha dan menyuplai 97% lapangan kerja. Namun, tantangan terbesar adalah meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil agar Indonesia dapat masuk ke strata negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, dari pendapatan 4.500 dolar AS menjadi 30.000 dolar AS per kapita.

Usaha mikro umumnya subsisten, bersifat informal, tidak terhubung ke dalam rantai pasok, tidak didukung oleh pembiayaan formal, dan sangat rentan. Namun, di sisi lain, usaha kecil dan mikro memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada perubahan, dan daya lenting yang tinggi dari berbagai krisis ekonomi. Di tengah menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional yang saat ini tinggal 18 persen, jumlah pelaku UMKM malah terus bertambah.

Lantas, apa yang dapat kita dilakukan untuk menjawab tantangan usaha kecil dan mikro agar bisa terus bertumbuh menuju negara berpendapatan tinggi di tahun 2045?

Saya ingin mengajak para pembaca yang budiman untuk terlebih dahulu memperluas imajinasi kita tentang UMKM di Tanah Air. UMKM tidak semerta-merta harus selalu kecil dan semenjana. Sebaliknya, UMKM justru dapat menghasilkan produk-produk unggul bernilai ekonomi tinggi, terhubung ke pembiayaan formal, dan terintegrasi ke dalam rantai pasok industri nasional bahkan global. Fondasinya inilah yang disiapkan oleh pemerintah 5 tahun terakhir, 2019 - 2024.

Strategi yang pertama adalah memperkuat sumber daya wirausaha nasional untuk melahirkan wirausaha yang kompetitif. Para pelaku usaha terutama dari generasi muda terdidik diharapkan dapat menghasilkan ekonomi baru yang berbasis pada riset, kreativitas, dan inovasi teknologi, menjadi "motor penggerak" dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Menyiapkan mereka memiliki bisnis model yang inovatif dan terhubung ke pembiayaan potensial melalui inkubasi adalah fasilitasi yang kami berikan.

Paralel dengan inisiatif tersebut, komponen-komponen dalam ekosistem UMKM diperkuat berbasiskan pada kelembagaan koperasi. Koperasi ini mengagregasi para UMKM, mengakselerasi dengan inovasi dan teknologi agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, serta menjalin kemitraan rantai pasok.

Inovasi dalam pembiayaan melalui reformasi Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dapat membantu usaha mikro mendapatkan akses terhadap pembiayaan formal melalui kelembagaan koperasi. Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco juga berperan meningkatkan akses pasar dan menjalin kemitraan untuk UMKM, melalui *center of excellence*.

Modernisasi teknologi produksi serta penguatan tata kelola koperasi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dilakukan melalui program seperti pembangunan *factory sharing* atau Rumah Produksi Bersama (RPB) berbasis komoditi lokal dan pengembangan sentra UMKM di daerah.

Ada juga inovasi dalam penilaian kredit (*innovative credit scoring*) yang sedang dikaji, untuk memudahkan akses perbankan bagi usaha mikro.

Ke depan, model ini dapat direplikasi dan diaplikasikan ke dalam pengembangan sentra UMKM berbasis komoditi unggulan lokal di seluruh pelosok negeri, yang diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai pelosok negeri, bukan seperti industri manufaktur dari luar yang hanya mencari buruh murah dan terpusat di Jawa.

Kami percaya, model inilah kunci dari “lapangan pekerjaan kelas menengah” yang menjanjikan buat generasi muda hari ini dan masa mendatang. Model ini pula yang diyakini dapat menaikkan pendapatan perkapita segenap rakyat sebesar 5 kali lipat di 2045 nanti.

Sambutan

MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Serial buku bertema “Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” menjadi dokumentasi penting sebagai selang pandang inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam mengembangkan ekosistem pendukung kemajuan KUMKM.

Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan serial buku ini. Saya ucapkan selamat kepada tim penulis dan setiap individu dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM atas keberhasilannya mewujudkan serial buku yang edukatif dan inspiratif.

Diawali dengan buku pertama ini yang berisikan ringkasan dari keseluruhan seri. Selanjutnya, sesuai judulnya, seri buku itu adalah

- *Rumah Produksi Bersama (RPB) dan Minyak Makan Merah; Koperasi Modern Memutar Roda Hilirasasi dan Industri Menengah Nasional;*
- *Korporatisasi Petani dan Koperasi Multi Pihak: Koperasi Kekinian;*
- *Transformasi Pembiayaan UMKM: Daya Ungkit Menuju Kemapanan;*
- *SOLUSI Nelayan: Mengurai Paradoks Si Miskin di Negara Maritim;*
- *Entrepreneur Hub dan Digitalisasi: Embrio Pengembangan Startup; dan*
- *Reformasi Badan Layanan Umum (BLU) LPDB-KUKM dan SMESCO: Modal Lancar, Jalan Gencar.*

Saya berharap semangat berkoperasi dan berwirausaha tidak luntur, dan semakin maju dalam menyejahterakan rakyat. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Berbagai inovasi dan adaptasi dibutuhkan, termasuk dengan menarik minat, bakat dan kecakapan generasi muda, untuk memajukan koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional.

Selamat membaca.

Jakarta, 31 Juli 2024



Daftar Isi

Sambutan

Menteri Koperasi dan UKM - 2

Daftar Tabel & Grafik - 8

Daftar Infografis - 8

Pendahuluan - 11

1

**Inovasi dalam Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM** - 45

4

**SMESCO, Partner Strategis
Koperasi dan UMKM dalam
Pemasaran** - 109

5

**Pabrik Minyak Makan Merah
Yang Mendobrak Kemapanan**

- 129

2

**Inovasi dalam Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM - 75**

3

**Menguatkan Sumber Daya
Wirausaha dengan *Entrepreneur
Hub* dan Inkubasi - 91**

Daftar Pustaka - 144
Glosarium - 148

Daftar Tabel

Tabel II.1	- Pembiayaan Penguatan Koperasi	77
-------------------	---------------------------------	----

Tabel III.1	- Entrepreneur Hub 2024	100
--------------------	-------------------------	-----

Grafik

Grafik III.1	- Jumlah Wirausaha di Indonesia	94
---------------------	---------------------------------	----

Grafik IV.1	- MSME Empowerment Report	113
--------------------	---------------------------	-----

Grafik IV.2	- Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	124
--------------------	---------------------------------------	-----

Grafik IV.3	- Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Melalui Event/Expo/Pameran	124
--------------------	---	-----

Grafik IV.4	- Jumlah UMKM yang Difasilitasi Melalui Channel Pemasaran	124
--------------------	---	-----

Grafik IV.5	- Layanan Konsultasi Pemasaran (UMKM)	125
--------------------	---------------------------------------	-----

Grafik IV.6	- Pendampingan dan Pelatihan UMKM (<i>offline</i>)	125
--------------------	--	-----

Infografis

Infografis I.1	- Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	19
Infografis I.2	- Bagan Rute Menuju Sosok Koperasi Masa Depan	40
Infografis I.3	- Arahan Presiden dan Strategi Transformasi	48
Infografis I.4	- Korporatisasi Nelayan Berbasis Koperasi	56
Infografis I.5	- Alur Rantai Pasok Kopontren Allttifaq	59
Infografis I.6	- Model Bisnis Pengembangan Koperasi Pangan	60
Infografis I.7	- Skema RPB	72
Infografis I.8	- Target Penumbuhan Koperasi Modern 2021-2024	72
Infografis II.1	- Model Pengembangan Koperasi Gunung Luhur Berkah	83
Infografis II.2	- Skema Penyaluran KUR Klaster kepada Anggota Koperasi Pangan Modern	87
Infografis III.1	- Road Map 2022-2024	95
Infografis: III.2	- Peta Sebaran Startup Program Pengembangan <i>Startup</i> Tahun 2023	103
Infografis: IV.1	- Trade Arms	115
Infografis: IV.2	- Jumlah UMKM	119
Infografis: V.1	- <i>Stakeholders</i> yang Dilibatkan pada Piloting Pabrik Minyak Makan Merah	139
Infografis: V.2	- Koperasi Petani Sawit	141



SUMMARY/RINGKASAN

INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

Pendahuluan

Pendahuluan



“Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik, semakin baik, **dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global,**”

Kutipan dari Pidato Presiden pada Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, 28 Maret 2022.



Presiden Joko Widodo pada Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, 28 Maret 2022.

Kecil tapi besar, seperti itulah peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia selama ini.

Mereka lah yang menyediakan berbagai kebutuhan kita sehari-hari dari makanan, pakaian hingga jasa-jasa dari potong rambut, *laundry* hingga tempat penitipan anak. Bank Indonesia dalam buku Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2015 mengungkapkan, para pelaku ekonomi rakyat ini tetap kokoh saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 – 1998, jumlahnya justru meningkat pasca krisis.

Jumlah UMKM kurang lebih 65 juta, dan berkontribusi terhadap PDB kita sebesar 61 persen. UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 97 persen, sebuah angka yang juga sangat besar.¹

Secara persentase jumlah UMKM kita sebetulnya tidak berbeda dengan negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea Selatan atau Tiongkok. Namun, tidak seperti mereka yang UMKM terkoneksi dengan industri besar, UMKM kita mandiri.

“Kondisi ini menciptakan UMKM yang tidak produktif dan tidak sustain karena minimnya transfer teknologi, tidak ada kepastian market, dan pada akhirnya sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam wawancara khusus dengan para penulis buku ini (04/06/2024).



Alih-alih menjadi pemasok bahan baku atau pembuat komponen dari industri besar, UMKM Indonesia justru menjadi penyalur atau penjual produk-produk industri besar. Warung-warung, pedagang kaki lima, juga pedagang yang berjualan secara *live* pagi siang sore malam di sosial media sebagian besar menajakan produk dari industri besar. Kondisi yang paradoksal, di satu sisi industri besar itu ‘menghidupi’ UMKM tetapi di sisi lain juga ‘menghabisi’ hidup UMKM yang bergerak di sektor produksi seperti misalnya kopi siap seduh rakyat yang terengah-engah karena gempuran kopi *sachet* industri besar, atau tenggelamnya minyak goreng kelapa yang banyak diproduksi oleh *home industry* karena meledaknya minyak goreng sawit skala pabrik pada dekade 80-an.



“Dari pelaku usaha mikro yang jumlahnya 96 persen (dari pelaku UMKM) itu **saya yakin mereka sebenarnya bukan benar-benar mau jadi *entrepreneur*, melainkan karena sektor formal tidak berkembang yang membuat lapangan kerja terbatas.** Untuk menghidupi keluarga, mereka bikin usaha kecil-kecilan tanpa perencanaan, analisis market, ataupun analisis potensi,” imbuh Menteri Teten Masduki.

Mengapa UMKM kita secara jumlah lebih besar di sektor perdagangan dan jasa dibandingkan di sektor produktif seperti usaha pertanian, perikanan, kelautan maupun perkebunan? Ya, karena tidak adanya kepastian harga pasar untuk produk yang mereka hasilkan. Sering terjadi, ketika panen tiba, para petani justru nelangsa karena harga hasil panennya jatuh. Bagaimana peternak ayam potong berdemo dengan membagi-bagikan gratis ayam siap panen mereka karena harga jualnya anjlok. Padahal, dalam waktu-waktu tertentu mereka mengalami kesulitan bahan produksi seperti kelangkaan pupuk, atau tipisnya stok jagung untuk pakan ternak.

Data Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia periode November 2007 sampai April 2013 menunjukkan,

Sektor perdagangan sebagai sektor yang paling banyak menerima manfaat KUR, menyerap hampir 34 persen dari total penyaluran KUR.⁽²⁾ Sementara sektor pertanian sebesar 5,7 persen dan

perikanan 0,5 persen. Padahal, kredit bermasalah (terlambat dalam pengembalian selama sedikitnya enam bulan) justru banyak terjadi di sektor perdagangan sebesar 28 persen, industri sebesar 12,6 persen. Posisi sektor pertanian sebesar 12,2 persen,

dan ini mematahkan persepsi bahwa risiko kredit bermasalah di sektor pertanian adalah besar.

Persoalan klasik yang belum terselesaikan lantas diperparah dengan kondisi tidak normal yang sedang kita alami seperti pandemi, perang Rusia-Ukraina, termasuk dampak perubahan iklim.

Meski UMKM bisa tegak berdiri di tengah krisis ekonomi 97-98, nyatanya pelaku usaha kecil terlibas ketika dunia dilanda pandemi Covid19. Pandemi membuat *cash flow* terganggu sehingga mereka

jadi kesulitan mengembalikan kredit kepada lembaga pembiayaan. Data Bank Indonesia pada Maret 2021 menyebutkan, ada 87,5 persen UMKM di Indonesia yang terdampak pandemi. Skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mereka jadi tidak lancar dan akhirnya makin sulit mendapatkan suntikan modal untuk memulihkan usaha, apalagi untuk mengembangkan usaha usai pandemi.



Pertanian merupakan sektor penting dan strategis untuk mendukung ketahanan pangan. Aktivitas saat panen raya daun bawang yang cukup melimpah di Wonosobo, Jawa Tengah, tahun lalu (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

Perubahan iklim dan berbagai bencana alam, selain memberikan efek negatif terhadap UMKM juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Musim hujan dan kemarau yang tidak lagi datang tepat waktu seperti dulu, membuat para petani sulit memanen hasil yang melimpah. Petani kakao Jembrana, Bali misalnya, kemarau berkepanjangan pada tahun 2023 memukul pendapatan mereka karena produktivitas tanaman kakao turun drastis. Nasib serupa dialami nelayan. Cuaca yang kian ekstrem membuat hasil tangkapan menurun dan lambat laun para nelayan mulai beralih profesi demi bertahan hidup. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas memproyeksi, pada tahun 2030 jumlah petani dan nelayan akan menurun hingga 2,4 persen atau sekitar 926.492 pekerja meninggalkan pekerjaannya akibat perubahan iklim.⁽³⁾ **Kalau hal ini diabaikan, bagaimana kita memenuhi kecukupan pangan bila para produsen pangan tak lagi mau bertanam, beternak maupun berlayar?**

Sementara itu, sektor industri sedang *sunset*. Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, sejak 2002 Indonesia telah terpapar oleh *dutch disease* yang membuat Indonesia mengalami deindustrialisasi sebelum berhasil menjadi negara industri maju. Penyakit ini dipicu karena Indonesia terlena oleh ledakan harga-harga

komoditas sehingga industri manufaktur tidak dikembangkan. Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun, dari 32% pada tahun 2002 menjadi hanya 18,3% pada 2022.⁽⁴⁾

Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 juga menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki untuk menaikkelaskan UMKM dan memodernisasi koperasi. **Caranya adalah dengan meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; meningkatkan dan menciptakan peluang usaha dan *startup*; dan meningkatkan nilai tambah usaha sosial.**

Sesungguhnya, pengembangan ekosistem UMKM bukan hal baru. Mengingat peran besar UMKM, semua pihak bergerak untuk membesarkan 'si kecil' ini agar tumbuh kembangnya bisa optimal. Hampir semua kementerian/lembaga, dunia akademisi, juga kalangan swasta memiliki program kegiatan pemberdayaan dan penguatan UMKM. Tapi, mereka bergerak sendiri, tentu dengan target sendiri. Adalah hal wajar, karena secara regulasi memang belum ada undang-undang yang khusus mengaturnya. Rancangan Undang-undang (RUU) Kewirausahaan sampai tahun 2021 juga belum final dibuat.

Melihat animo besar di pemerintahan baik pusat maupun daerah juga kalangan masyarakat untuk akselerasi pertumbuhan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM berinisiatif untuk dibuatkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum

dari penguatan ekosistem kewirausahaan nasional. Memang sesungguhnya sudah ada Undang-undang Tahun 2008 No.20 tentang UKM, namun seiring dengan perkembangan zaman dan dunia kewirausahaan yang pesat, undang-undang ini tak lagi cukup. Akhirnya, pada 3 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024.

“Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan jumlah pertumbuhan wirausaha di Indonesia yang masih mencapai 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat,”

ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, dikutip dari laman Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (24/01/2022).

Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pengembangan koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok, atau klaster berdasarkan sentra produksi komoditas dan wilayah.

Pemberdayaan dilakukan secara lintas sektoral, dan mengedepankan kemitraan.

Prioritas pemberdayaan koperasi dan UMKM pada sektor ril (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.

Pemberdayaan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM.

Modernisasi dan inovasi teknologi.



Infografis 1.1 : Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2024.

Dengan demikian, semua pihak yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri bisa terorkestrasi sehingga program pengembangan kewirausahaan nasional bisa selaras, berpadu padan, dengan tujuan di titik yang sama yaitu pertumbuhan wirausaha dan peningkatan rasio kewirausahaan. Target yang dipatok adalah bisa menciptakan satu juta wirausaha baru pada tahun 2024.

Perpres juga mengamanatkan pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pelaksana Komite ini diketuai oleh Menteri Koperasi dan UKM, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Dalam Negeri. Komite ini beranggotakan 20 K/L. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM untuk bergerak dan merangkul semua *stakeholder* makin dimungkinkan dengan dukungan digital. Sehingga upaya untuk mengumpulkan semua data dan rekam jejak UMKM nasional dalam satu *platform* dapat terwujud. Tujuannya agar perkembangan UMKM dapat terukur perkembangannya. Dan *Platform* yang kemudian lahir dan dinamai *Entrepreneur Hub* atau *eHub*.

Menurut Noailles-Simeon (2018), kebijakan kewirausahaan memungkinkan para pengusaha untuk lebih mudah membangun usaha baru dan/atau mengembangkan produk atau layanan baru. Kebijakan ini ada dua tingkat, yaitu nasional yang fokus pada sisi hukum, dan kebijakan lokal yang lebih

menyentuh sisi sosialnya. Namun, secara keseluruhan, kebijakan itu harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan seseorang, mulai dari kemampuan menerima risiko hingga etika menjadi seorang pewirausaha.

Lantas, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM dengan kepemimpinan Menteri Teten Masduki menjalankan tugas untuk menaikkan kelas UMKM seperti yang diamanatkan RPJMN? Tentu ini juga bukan pekerjaan mudah. Tak lain karena UMKM kita yang terserak dan bekerja sendiri-sendiri.

“Tidak bisa individual. Mereka bisa naik kelas bila bersama-sama **karena itulah kami memiliki program korporatisasi, yaitu bagaimana mengagregasi usaha-usaha mikro, apakah itu petani, peternak, petambang, sehingga mereka mencapai skala ekonomi.** Ketika mencapai titik ini, mereka punya potensi untuk naik kelas,”

kata Menteri Teten Masduki. _____

Kebijakan pengembangan sektor riil berbasis sumber daya ekonomi lokal dikuatkan, khususnya di bidang pangan yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan. Petani-petani berlahan sempit yang hasil panen mereka hanya untuk bertahan hidup, berkonsolidasi dalam koperasi membuat luas lahan bisa mencapai skala ekonomi. Potensi mereka untuk mengembangkan usaha misalnya menambah luas lahan atau menambah peralatan produksi

pun muncul. Adanya lembaga berbadan hukum dalam bentuk koperasi memungkinkan untuk mendapat pembiayaan yang sulit mereka akses ketika masih bergerak sendiri-sendiri. “Bank Dunia sudah mengingatkan Indonesia untuk segera menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas karena usaha mikro yang sejumlah 97 persen itu adalah mereka-mereka yang berjualan bakso, bubur ayam, petani kecil, peternak kecil. Semua ini dianggap tidak berkualitas,” kata Menteri Teten.

Karena tidak lagi bisa menunggu investasi asing untuk menumbuhkan industri manufaktur, maka perlu menumbuhkan industri menengah yang mengolah hasil kekayaan alam, baik itu hasil tambang maupun hasil-hasil pertanian, perkebunan maupun akuakultur. Konsep ini diwujudkan lewat program Rumah Produksi Bersama (RPB) yang dikelola oleh koperasi dan mulai diinisiasi sejak 2022.



Selain RPB, perbaikan maupun inovasi KementKopUKM selama hampir lima tahun terakhir ini adalah **Pabrik Minyak Makan Merah, Korporatisasi Petani dan Koperasi Multi Pihak, Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan, Transformasi Pembiayaan UMKM, Entrepreneur Hub, Digitalisasi dan Inkubasi sebagai embrio pengembangan startup dan Reformasi Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM yaitu LPDB-KUMKM dan SMESCO.** Perjalanan dan pelaksanaan program-program inilah yang didokumentasikan dalam serial 7 buku bertema Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM.

Diawali oleh buku seri 1, yang Anda pegang saat ini, adalah **Summary atau ringkasan** dari seluruh perbaikan maupun inovasi-inovasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM yang dipimpin Menteri Teten Masduki. Buku ini sekaligus pengantar untuk buku seri selanjutnya, yaitu seri 2 hingga 7.

Pada buku seri 2 tentang **Rumah Produksi Bersama dan Minyak Makan Merah,** membahas bagaimana Rumah Produksi Bersama (RPB) menjadi upaya untuk menciptakan fondasi industri menengah berbasis kekayaan lokal sekaligus menjadi cara memodernisasi koperasi. Koperasi masa kini nyatanya bisa memiliki pabrik. Di buku ini dijelaskan tentang hilirisasi sumber daya alam skala kecil, rantai pasok dan rantai hilirisasi, tata kelola RPB oleh koperasi, inovasi teknologi hingga aspek pembiayaan dan aspek pemasaran RPB.



Buku Seri #1 Summary atau Ringkasan

Saat ini, ada 13 *piloting project* RPB yang tersebar di Kabupaten Batubara untuk komoditas cabai merah; Yogyakarta untuk komoditas susu; Kabupaten Tanah Laut untuk komoditas karet; Kabupaten Jembrana untuk komoditas kakao; Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk komoditas garam; Kabupaten Sukoharjo untuk komoditas rotan; dan Kabupaten Manggarai Barat untuk komoditas bambu; dan Kabupaten Garut untuk hilirisasi komoditas kulit. Sementara, di tahun 2024 ini, pembangunan RPB di Aceh dengan komoditas nilam menjadi minyak atsiri akan dilanjutkan setelah sempat ditunda.

RUMAH PRODUKSI BERSAMA
DAN MINYAK MAKAN MERAH:
KOPERASI MODERN
MEMUTAR RODA
HILIRISASI & INDUSTRI
MENENGAH NASIONAL



Buku Seri #2 Rumah Produksi
Bersama & Minyak Makan Merah



Di buku 2 juga menyajikan tulisan tentang **Pabrik Minyak Makan Merah**

yang terintegrasi koperasi. Selain inovasi, adanya Pabrik Minyak Makan Merah yang kehadirannya saat itu dipicu terjadinya kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, menjadi terobosan penting bagi sejarah pangan nasional.

Pertama, penyediaan pangan sehat karena kandungan vitamin A, vitamin E dan nutrisi lain dipertahankan dalam proses pengolahan minyak sawit menjadi minyak makan merah. Vitamin-vitamin ini secara alami dikandung minyak sawit dan selama ini sumber nutrisi ini dibuang sia-sia karena proses pemutihan dalam pengolahan minyak sawit menjadi minyak goreng sawit yang berwarna kuning keemasan.

Kedua, petani sawit yang selama ini hanya menjadi 'penonton' dalam industri sawit nasional yang dikuasai pemodal besar, dengan bergabung bersama-sama dalam koperasi bisa memiliki pabrik pengolahan minyak goreng. Petani sawit pun berperan serta dalam hilirisasi sawit. Tiga *piloting project* sedang dikerjakan di Deli Serdang, Asahan dan Langkat, Sumatra Utara.

Minyak Makan Merah, kehadirannya dipicu saat terjadi kelangkaan minyak goreng pada 2022. (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

Pada buku seri 3 yang berjudul
Korporatisasi Petani dan Koperasi Multi

Pihak membahas bagaimana upaya KemenKopUKM dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Koperasi multi pihak di sektor pertanian bisa menjadi basis kelembagaan korporatisasi petani. Bisa jadi ide korporatisasi lewat koperasi multi pihak ini masih asing bagi awam, namun di luar negeri sudah banyak yang berhasil mengembangkannya. Hal ini tentu menjadi harapan, di sini pun juga berpotensi untuk sukses meski tentu saja butuh waktu untuk mencapainya.



TRANSFORMASI
PEMBIAYAAN UMKM
DAYA UNGKIT MENUJU
KEMAPANAN



Buku Seri #4 Transformasi
Pembiayaan UMKM

Sedangkan **buku seri 4** menyajikan
bahasan tentang **Transformasi**

Pembiayaan UMKM. Pembiayaan
selalu menjadi topik penting dalam
pengembangan UMKM, terlebih
pembiayaan konvensional yang ada
selama ini kurang bisa menjangkau
usaha-usaha mikro maupun kecil karena
ketiadaan agunan. Inovasi Kementerian
Koperasi dan UKM dalam menginisiasi
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster
dan *pre financing* atau pembiayaan rantai
pasok pada UMKM menjadi transformasi
pembiayaan yang diharapkan bisa
menguatkan koperasi dan UMKM. Salah
satu contoh keberhasilan program



Koperasi Multi Pihak Sarana Argo Lestari yang memproduksi beras Cettar Siap mem-
berangkatkan 5,4 ton beras ke pasar melalui PT Jatim Grha Utama pada 14/5/2024 lalu
(Sumber: Dok. KMP Argo Lestari).



Koperasi Pesantren Al Ittifaq sedang menyortir dan mengemas produk hortikultura milik petani anggota koperasinya. Koperasi ini mendapat pendanaan LPDB dengan skema pembiayaan pre financing. (Sumber: Dok. Koperasi Al ittifaq)

KUR Klaster adalah perkembangan para peternak domba Nurul Hidayah di Garut dan pembiayaan *pre financing* Koperasi Alif atau juga dikenal sebagai Koperasi Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung yang mampu mengagregasi petani-petani kecil dan memasok produk pertanian ke berbagai *modern market* seperti Superindo, Yoga Group dan Alifmart.

Buku seri 5 mengulas **Program Solusi**

Nelayan atau Solar Untuk Koperasi

(Solusi) Nelayan yang merupakan kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perikanan dan Kelautan dan PT Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM bersubsidi. Program ini adalah pendirian Pom bensin mini di desa-desa nelayan yang dikelola oleh koperasi nelayan dengan skema murni bisnis dan bukan program hibah. Harapannya, bukan hanya membuka



Buku Serri #5 Solusi Nelayan Mengurai Paradoksi Miskin di Negara Maritim

akses pada BBM bersubsidi yang merupakan komponen terbesar biaya melaut, tetapi bisa menguatkan ekosistem nelayan-nelayan kecil yang bergabung dalam koperasi. *Pilot project* Solusi Nelayan ada di Aceh Besar, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur.



Menteri Koperasi dan UKM Teteh Masduki dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meresmikan program Solusi Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9/2022) lalu. (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

ENTREPRENEUR HUB & DIGITALISASI: EMBRIO PENGEMBANGAN STARTUP



Buku Seri #6 Entrepreneur Hub & Digitalisasi : Embrio Pengembangan Startup

Sementara itu, buku seri 6 mengupas **Entrepreneur Hub & Digitalisasi: Embrio Pengembangan Startup**

Buku ini membahas bagaimana *Entrepreneur Hub* sebagai program dan *platform* menjadi dasar pengembangan wirausaha Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Penguatan ekosistem kewirausahaan mutlak dilakukan bersama-sama dan semua *stakeholders* bisa saling berkoordinasi, karena ada target besar yang hendak dituju, yaitu meningkatkan rasio kewirausahaan. Dengan program *Entrepreneur Hub*

yang salah satunya diwujudkan lewat *platform one-stop service Entrepreneur Hub* atau eHub, sehingga wirausaha pemula maupun mapan, bahkan individu yang baru memiliki niat berwirausaha bisa mendapatkan bimbingan dan *skill* kewirausahaan.

Arah pengembangan digitalisasi wirausaha juga upaya untuk menciptakan ekonomi baru dengan mendorong perusahaan rintisan yang selama ini lebih banyak berada di penjualan dan jasa, bergeser ke sektor produksi atau bisa menjadi agregator pelaku usaha di sektor-sektor produksi. Kementerian Koperasi dan UKM berperan mengorkestrasi upaya-upaya peningkatan kapasitas kewirausahaan yang juga dilakukan berbagai pihak.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak mahasiswa menjadi pengusaha saat menjadi pembicara kunci dalam Kuliah Umum Kewirausahaan pada acara "Paten Goes To Campus" di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Sabtu (4/6/2022). (Sumber: Dok. KemenKopUKM).



Buku Seri #7 Reformasi BLU :
LPDB-KUKM & LLP-KUKM

Buku seri 7 adalah *Reformasi Badan Layanan Usaha SMESCO dan LPDB.*

Buku ini mengupas peran pembiayaan atau kredit bagi UMKM dan koperasi, dan kemudian bagaimana LPDB atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir kini bertransformasi hanya memberikan pembiayaan kepada koperasi. Disertai juga *case study* untuk melihat bukti empiris di lapangan yang telah tersentuh program ini. Sedangkan bagian SMESCO membahas konsep serta model bisnis SMESCO. Implementasi program dan implikasi program serta bagaimana SMESCO tidak hanya menyentuh pemasaran produk-produk koperasi dan UMKM tetapi juga menjadi *center of excellence*.



MEMBENTUK SOSOK KOPERASI MASA DEPAN

Bila digambarkan dalam bagan dalam dimensi waktu, inovasi-inovasi KemenKopUKM di bawah Kepemimpinan Menteri Teten berhadapan dengan situasi yang dihadapi koperasi-koperasi saat ini sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan, dan membentuk sosok koperasi masa depan. Implementasi dari sebagian inovasi itu memang terpisah-pisah pada lokasi geografis masing-masing, dan skala pengaruhnya pada masing-masing lokal, selain ada yang skala pengaruhnya nasional, seperti KUR Klaster, LPDB dan SMESCO.

Inovasi ini membawa perubahan besar pada koperasi. Bagaimana koperasi saat ini bisa memiliki pabrik lewat program Rumah Produksi Bersama dan Minyak Makan Merah misalnya. Sebagai pemilik pabrik, ada tanggung jawab, cara kerja dan target yang juga berubah yaitu bagaimana mereka harus mampu mengagregasi bahan-bahan mentah agar bisa memenuhi tiga syarat ketika roda pabrik sudah berputar: kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi.

Inovasi-inovasi ini pada akhirnya akan menghapus stigma bahwa koperasi identik dengan memproduksi barang-barang kerajinan. Selanjutnya adalah ketika komoditas unggulan sudah teridentifikasi, pabrik sudah berdiri dan mitra kerja sudah terjalin, bukan berarti pekerjaan selesai. Justru ini menjadi pintu gerbang baru untuk melangkah lebih jauh yaitu bagaimana membuat usaha mereka berkembang. Produk mereka harus kompetitif di pasar dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. *Competitiveness* ini yang harus dipikirkan oleh koperasi.





Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau, salah satu dari 3 piloting project pembangunan pabrik minyak merah yang terintegrasi dan dikelola koperasi. Foto diambil pada 21 Mei 2024. (Foto: Musa Sanjaya)

Minyak Makan Merah yang pabriknya dimiliki Koperasi Pujakesuma, Deli Serdang bisa menjadi contoh. Kehadirannya yang dipicu saat terjadi kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 ternyata bukan sekedar bisa menjadi alternatif minyak goreng bagi masyarakat yang terbiasa mengonsumsi minyak goreng sawit berwarna kuning keemasan, tetapi yang lebih mengesankan adalah kandungan vitamin A dan vitamin E yang berhasil dipertahankan dalam minyak makan merah membuatnya bisa dijadikan suplemen kesehatan. Bahkan minyak merah ini termasuk *specialty fat*, lemak nabati untuk menunjang kebutuhan industri *confectionery* produk-produk berkualitas tinggi.

Keunggulan produk seperti halnya Minyak Makan Merah ini harus ditemukan dan diciptakan oleh koperasi pemilik Rumah Produksi Bersama yang *piloting project*-nya sudah tersebar di 13 daerah yaitu:

1

Koperasi Anugerah Jonggon Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengolah jahe gajah menjadi tepung jahe untuk memasok industri hilir produk-produk obat tradisional, industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Terlebih, meski saat ini RPB ini belum memulai bisnis, namun sudah mendapatkan *offtaker* lokal yang akan membeli 100 kilogram tepung jahe per minggu

2

Koperasi Berkah Jaya Abadi, Kabupaten Batubara yang mengolah cabai merah yang merupakan produk pertanian unggulan kabupaten ini menjadi pasta cabai. Per hari RPB ini mampu memproduksi tiga ton pasta cabai kemasan yang diambil oleh *offtaker*.

3

Koperasi Serba Usaha Megataru, Kabupaten Minahasa Utara yang mengolah kelapa dan turunannya seperti sabut kelapa menjadi *coco chip/ coconut husk chip*, untuk media tanam anggrek untuk pasar ekspor. Rumah Produksi Bersama ini ditargetkan memproduksi 600 kilogram *coco chip* per hari.

4

Koperasi Talenta, Kupang yang memiliki RPB yang bergerak di rumah potong hewan. Beberapa *offtaker* telah menjalin kerja sama dengan koperasi untuk penyediaan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Pada tahap awal, telah dilakukan pemotongan sapi di RPB sebanyak seekor sapi per dua hari. Direncanakan nantinya jika sudah beroperasi penuh, RPB dapat mengolah 20 ekor sapi per hari.

5

Koperasi Wanatani Bambu Lestari, Kabupaten Manggarai Barat dengan RPB produksi bambu laminasi yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku konstruksi, *furniture*, dan kerajinan. Dilengkapi dengan berbagai mesin produksi dan fasilitas yang dapat mengolah bambu dari bahan baku hingga menjadi papan laminasi. Hingga Februari 2024, Rumah Produksi Bersama telah mampu memproduksi 33 papan, sedangkan targetnya fasilitas ini dapat memproduksi 167 papan atau tiga meter kubik per hari. Namun, untuk memenuhi fungsinya, Rumah Produksi Bersama ini masih memerlukan pelatihan pembuatan *furniture*, pendampingan sertifikasi ISO 9001, pelatihan kerajinan produk olahan bambu, pelatihan pengolahan bambu, dan pelatihan penanaman bambu.



RBP yang dikelola Koperasi Cinta Carma Bella menjadi tempat kerja bersama untuk produksi bermacam produk berbahan kulit. Foto diambil pada Sabtu (17/2/2023). (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

6

Koperasi Cinta Carma Bella yang mengelola RPB pengolahan dan kerajinan kulit di Kabupaten Garut. RPB ini akan memproduksi produk berbahan kulit mulai dari jaket, sepatu, sandal, tas dan aksesoris lainnya. Menteri Teten Masduki berharap, produk hilir RPB ini harus berkelas dunia. Karena itu, RPB ini bukan sekadar menyediakan alat produksi, tapi juga sebagai *co-working space* sebagai tempat untuk belajar bersama, bertukar informasi untuk inovasi produk agar selaras dengan trend produk kulit dunia dan memahami perilaku konsumen. RPB harus bisa menjadi *“Center of Excellence”*.

7

Koperasi Produksi Mappatuwo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengelola RPB Pengolahan Garam. Sejak Desember 2023, RPB ini mulai berjalan dengan kapasitas produksi mesin kurang lebih 30 ton per hari. Meski belum diresmikan, bisnis di RPB sudah berjalan. Dari bulan Januari 2024 hingga April 2024 RPB ini telah memproduksi total 750 ton garam dan mencatat angka penjualan 687 ton.



8

Koperasi Buana Merta Abadi, Kabupaten Jembrana yang mengelola RPB komoditas kakao diolah menjadi coklat. Kapasitas maksimal produksi adalah 150 kilogram per hari, namun RPB ini baru mampu memproduksi dan bertransaksi dengan kapasitas 10 - 15 kilogram per hari. Produk yang sudah dihasilkan antara lain nibs, coklat bubuk, pasta coklat, *cocoa butter*, dan coklat batangan. Kendalanya ternyata pada hulu, yaitu kurangnya bahan baku karena berkaitan dengan cuaca tahun 2023 yang membuat produktivitas tanaman kakao mengalami penurunan sangat drastis akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

9

Koperasi Trangsang Manunggal Jaya yang mengelola RPB pengolahan bahan baku rotan asalan menjadi bahan baku, pembuatan furniture rotan, ekspor *furniture*, dan penelitian pengembangan rotan (*research and development*). Hasil produksi RPB berupa rotan fitrit, rotan poles, dan furniture dengan kapasitas produksi 247 ton per bulan.

10

Koperasi Bokar, Kabupaten Tanah Laut yang mengelola RPB yang diharapkan dapat memproduksi bahan olah karet rakyat (bokar) SIR 20 dengan K3 100% yang nilai jualnya mencapai Rp25.500 per kilogram, karet lembaran asap bergaris (*ribbed smoked sheet* atau RSS), atau barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. Ditargetkan mampu mencapai kapasitas produksi 10 ton per hari SIR dan lima ton per hari RSS.

11

Koperasi Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta (PPDKY) dengan RPB komoditas susu di Kabupaten Sleman. RPB ini menjadi fasilitas pengolahan UHT dan kemasan aseptik yang dapat diakses oleh UMKM yang bergerak di bidang susu. Diharapkan nantinya muncul efek domino. Peternak susu dapat memperluas pemasaran, serapan susu lokal ikut meningkat secara signifikan.

Setiap tempat tentu memiliki masalah dan kendala masing-masing. Tetapi, keberadaan RPB ini adalah modal besar untuk terus bergerak maju. Untuk itu, koperasi, terutama pengurus koperasi harus memiliki ketangkasan (*agility*) untuk bisa membawa koperasi yang selama ini terstigma jadul dan lamban bisa menjadi organisasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, terutama dunia bisnis yang sangat dinamis. Dibutuhkan peran anak-anak muda untuk ikut terjun dalam membangun koperasi agar bisa memahami kebutuhan sesuai eranya. Regenerasi pengurus koperasi mutlak diperlukan agar awal yang baik ini tidak terhenti di jalan.

Peran serta anak muda ini sudah dibuktikan oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, Kabupaten Subang. Mengusung slogan Milenial Bertani dan Berkebun, anggota koperasi yang sebagian besar anak muda ini menggerakkan usaha pertanian dan perkebunan serta budidaya kopi jenis Arabika dan Robusta dan bekerjasama dengan Perhutani, PTPN VIII, kelompok tani serta para pelaku usaha kopi. Keberadaan koperasi membuat petani lebih mudah menjual hasil panen mereka sehingga koperasi ini mampu mengeksport kopi ke Taiwan, Korea, dan Saudi Arabia sejak tahun 2020. Koperasi ini bisa menjadi contoh keberhasilan korporatisasi petani dan bentuk koperasi modern di tangan generasi milenial.

Bila melihat sekilas, semua inovasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dengan kepemimpinan Menteri Teten Masduki terlihat terserak di berbagai tempat dan seperti tidak ada hubungan satu sama lain. Namun, bila kita cermati, ada keterkaitan erat, bahkan inovasi yang satu menjadi penguat bagi inovasi yang lain dan bila dihubungkan dan diorkestrasi, maka koperasi akan mampu memenuhi amanat UUD 1945: sebagai sokoguru perekonomian.

Peran yang hingga saat ini belum mampu dijalankan oleh koperasi. Untuk sampai ke sana, pemangku kepentingan di daerah harus mampu melihat, mengidentifikasi, kemudian mengoordinasikan berbagai inovasi yang ada atau mereplikasi inovasi yang sudah berhasil di daerah lain. Dibutuhkan kemampuan untuk mengelola berbagai inovasi yang pada akhirnya mampu membawa koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah setempat.

Sebagai gambaran bagaimana satu inovasi bisa saling terhubung dengan inovasi lain yang bila diterapkan secara ideal akan berujung pada tercapainya koperasi modern.

Bagan Rute Jalan Menuju Sosok Koperasi Masa Depan

Koperasi Konvensional

Skala ekonomi sesuai pemenuhan kebutuhan anggota untuk berlanjut hidup, simpan pinjam, administrasi manual, dan belum berjejaring dengan penyerta modal (investor).

Koperasi dalam Transisi

Mencoba model koperasi multi pihak, modernisasi koperasi dengan digitalisasi, transformasi pembiayaan dengan pre financing bersama LPDB dan akses KUR Klaster, penguatan ekosistem koperasi melalui fasilitasi inovatif seperti Solusi Nelayan, Rumah Produksi Bersama, Pabrik Minyak Merah.

Koperasi Maju

Skala ekonomi bisnis sesuai penemuan pasar, menjadi agregator, offtaker, pemilik pabrik, pelaku rantai pasok, dan mampu meraih penyertaan modal dari berbagai pihak.

Infografis I.2 : Bagan Rute Menuju Sosok Koperasi Masa Depan

Menciptakan sosok koperasi masa depan, itu yang bisa disimpulkan dari program-program yang diinovasi selama hampir lima tahun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan kepemimpinan Menteri Teten Masduki

Kepemimpinan adalah tentang bergerak maju, membentuk masa depan yang sebetulnya belum ada -dengan berbekal masa lalu dan kerja di masa sekarang- menjadi ada. Pemimpin yang meletakkan masa lalu pada tempatnya sebagai masa lalu, ia tidak akan takut mengambil risiko dan mengalami kegagalan untuk bekerja di masa kini, sehingga akhirnya ada masa depan.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menghadiri pemberian Nomor Induk Bersama (NIB) gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perseorangan di Gelanggang Olahraga (GOR) Lembah UGM, Sleman, Yogyakarta, Selasa (23/8/2022). (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

Bagaimana pun, potensi kegagalan atau ketidaksempurnaan selalu ada dalam setiap inovasi. Dalam konteks ini bila dikaitkan dengan posisi Kementerian Koperasi dan UKM sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dikelompokkan dalam Kelompok III, yaitu Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, Menteri Teten Masduki bersama jajarannya harus bisa luwes dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, yang terkait langsung dengan program-program yang digulirkan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengalaman dan jejak karier Teten Masduki yang merentang luas: sebagai aktivis dalam gerakan masyarakat sipil hingga kemudian masuk ke lingkaran kekuasaan memungkinkannya terjadi. Ada benang merah yang terlihat dari kebijakan dan keberaniannya mengeksekusi program-program yang tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kemampuannya untuk menggandeng kementerian/lembaga lain: bagaimana mengubah nasib rakyat kecil menjadi berdaya dan sejahtera, rakyat yang -menyitir puisi karya Hartojo Andangdjaja- adalah jutaan tangan yang mengayun dalam kerja di bumi tanah tercinta.



Ketujuh buku serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM ini tidak bermaksud untuk selebrasi, namun bagaimana kerja-kerja yang sudah dimulai bisa tersosialisasi kepada masyarakat luas sehingga makin banyak pelaku UMKM dan koperasi yang mendapatkan manfaatnya.



Lebih dari itu, celah-celah yang ditemukan di lapangan selama pelaksanaan program dapat terlihat, dan menjadi rujukan baru untuk melengkapi ekosistemnya atau dalam rangka membuat inovasi yang belum cukup ini menjadi tercukupkan.

Tiap-tiap inovasi merupakan hasil kreasi dan adopsi suatu ide atau perilaku baru dalam organisasi (Lam 2024), dan senantiasa membutuhkan kondisi-kondisi yang membuat inovasi itu bisa berlanjut, baik mengenai produk, proses dan maupun organisasinya itu sendiri (Boer dan During 2001).



Koperasi merupakan bentuk organisasi yang kompleks, terutama karena sifat koperasi yang harus bisa memecahkan masalah-masalah para anggotanya menghadapi lingkungan yang terus berubah. Para pengurus koperasi lah yang menjadi garda terdepan dalam berinovasi-inovasi untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah.



SUMMARY/RINGKASAN
INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

Inovasi dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM



1

Inovasi dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM



Sejumlah inovasi, perubahan dan pengembangan digagas **Kementerian Koperasi dan UKM** untuk mewujudkan **koperasi modern dan membangun fondasi industri lewat usaha kecil dan menengah (UMKM).**



Petani daun bawang di Wonosobo, Jawa Tengah yang terus berinovasi untuk meningkatkan produktivitas agar hasil panen berlimpah. (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

Inovasi memang sebuah pilihan yang rasional. Sebuah keniscayaan. Inovasi atau mati langkah, begitu istilah yang tidak asing lagi bagi mereka yang berkecimpung di dunia bisnis dan manajemen. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kerap mengingatkan jajarannya di Kementerian Koperasi dan UKM tentang pentingnya inovasi dalam setiap program di Kementerian tersebut.

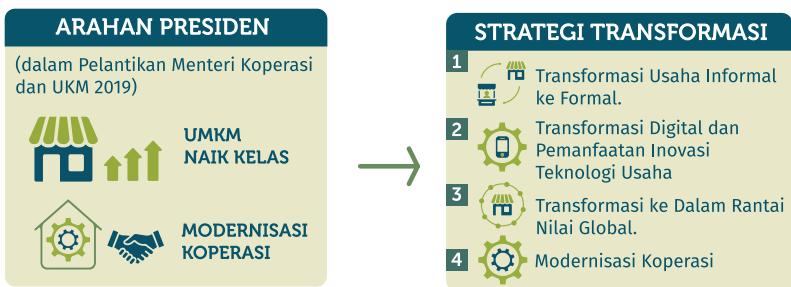
“Jika tidak inovatif, Indonesia bisa gagal menjadi negara maju bahkan sulit mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045. Oleh karena itu, peran KemenKopUKM itu penting, karena deindustrialisasi terus terjadi,”

begitu pesan Menteri Teten yang disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menjaring masukan dalam upaya pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. ⁽⁵⁾

Salah satu inovasi yang dilakukan untuk mengisi 'ruang kosong' dari deindustrialisasi adalah dengan meluncurkan program korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi.

Makna sederhana dari korporatisasi petani dan nelayan adalah mengagregasi dan mengonsolidasikan petani dan nelayan kecil ke dalam satu wadah koperasi sehingga memiliki skala ekonomi. Begitu pun dengan UMKM, didorong untuk bergabung dalam koperasi sehingga bisa meningkatkan skala usaha, dari kecil menjadi menengah, sehingga bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Maka, dua fokus utama dalam kepemimpinan Menteri Teten Masduki di Kementerian Koperasi dan UKM adalah mendorong modernisasi koperasi dan meningkatkan skala UMKM melalui koperasi. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.



Infografis 1.3 : Arahan Presiden dan Strategi Transformasi

Untuk mewujudkan dua tujuan utama tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi sejumlah program yang bersinergi dengan para *stakeholder*, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.

Berikut *piloting project* dari pengembangan koperasi dan UMKM selama 2020-2024.

DIGITALISASI KOPERASI NELAYAN

“Laut bagi saya seperti rumah. Laut adalah sumber kehidupan saya dan keluarga, karena laut saya bisa menyekolahkan anak-anak,” ucap Tukimin, nelayan di Kabupaten Cilacap, dengan senyum yang sumringah. Tukimin adalah satu dari sekitar 8000 nelayan yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo. Pria yang sudah 22 tahun menjadi anggota Mino Saroyo ini telah banyak merasakan manfaat menjadi anggota dari koperasi yang disahkan pada 1996 ini.

“Dulu kalau enggak punya uang, saya pinjam alat ke sana ke mari untuk melaut, kalau tidak ada yang bisa meminjamkan terpaksa saya tidak melaut,” kata Tukimin. Namun, sejak bergabung dengan KUD Mino Saroyo, kesulitan tersebut bisa diselesaikan dengan koperasi. **“Sekarang, saya bisa mengajukan pinjaman bilamana pas musim paceklik saya butuh dana untuk melaut.** Selain itu, urusan BBM juga sekarang jauh lebih mudah karena sudah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN),”

kata Tukimin.

Pekerjaan sebagai nelayan juga dirasa jauh lebih mudah karena semua sudah dilakukan secara digital, misalnya pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), semua transaksi sudah menggunakan gawai.

KUD Mino Saroyo adalah praktik baik dari koperasi konvensional yang bertransformasi menjadi koperasi modern yang melek digital. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam memasukkan sistem digitalisasinya yang bekerjasama dengan PT CUSO Digital Indonesia.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan solar bersubsidi saat peluncuran program Solusi Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9/2022). (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

“Jika dulu transaksi di TPI nelayan hanya menggunakan kode-kode ikan, misalnya ikan tuna kodenya apa, ikan tongkol apa, sekarang semua tinggal tekan layar tab yang *dashboard*-nya masuk ke KemenKopUKM,”

kata Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan, Kementerian Koperasi dan UKM Bagus Rachman.

Melalui sistem digital, semua aktivitas nelayan dapat terekam secara akurat, mulai dari kapal tiba di pelabuhan sampai proses pelelangan ikan. Transaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pun berlangsung jauh lebih cepat dan efisien daripada cara manual. Dengan proses pelelangan yang cepat, kualitas ikan pun menjadi terjaga. Dengan sistem digital tersebut, maka peningkatan suatu koperasi yang salah satu indikatornya adalah peningkatan pendapatan anggotanya, dapat terukur. “Dari sini kita dapat mengidentifikasi apakah pendapatan nelayan dan produktivitas komoditasnya sudah meningkat 5% per tahun atau belum, sesuai target RPJMN 2020-2024,” ujar Bagus.

Selain penerapan digitalisasi, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola manajemen usaha dan peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan nilai tambah produksi olahan perikanan.

Sebagai sebuah koperasi nelayan, KUD Mino Saroyo memiliki berbagai unit usaha yang terbagi atas Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di delapan lokasi, Unit Simpan Pinjam yang dapat memfasilitasi permodalan nelayan untuk melaut, Unit Waserda Unit Penjualan Air Bersih, dan Unit Jasa.

Koperasi juga memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang menjadi proyek percontohan program Solusi Nelayan, atau Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Merupakan program bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina, untuk memenuhi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar maupun produk Pertamina lainnya bagi nelayan anggota koperasi.



Aktivitas jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik KUD Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, yang telah memanfaatkan media digital, Sabtu (17/9/2022). (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

Selain bisa memberikan harga solar yang lebih murah kepada anggotanya, produktivitas nelayan pun dapat dipantau lewat pemakaian solarnya. Selain terhubung dengan aplikasi Mino Saroyo, koperasi juga menggunakan aplikasi MyPertamina untuk memastikan proses penyaluran BBM tepat sasaran.

“Lewat aplikasi, bisa terlihat berapa pendapatan nelayan dari BBM yang digunakan. Karena nelayan harus mengeluarkan 60% biaya produksi untuk solar agar dapat melaut,” imbuh Bagus. Jika dia rajin melaut, maka jatah BBM-nya juga meningkat. **“Jika jatah BBM berkurang misalnya, berarti nelayan kurang banyak melautnya, hasil tangkapannya kurang banyak, dan sebagainya”**

_____ jelas Bagus.

KUD Mino Saroyo bisa menjadi contoh terbaik bagi upaya penguatan ekosistem nelayan melalui koperasi lewat program Solusi Nelayan. Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan hadir sebagai solusi untuk memperluas akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Peran BBM ini sangat strategis bagi nelayan, dari survey Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bisa mencapai 60-70 persen dari total ongkos produksi tiap kali melaut. Karena itu, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, otomatis para nelayan menjerit karena ongkos produksi yang membengkak.



Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto di depan SPDN yang menjadi salah satu unit usaha koperasi. (Sumber: KemenKopUKM)

Nelayan, sebagai salah satu sektor produktif yang strategis, sudah mendapat alokasi subsidi BBM dari pemerintah. Tapi persoalannya, BBM bersubsidi itu kurang terserap oleh mereka.

“Pertanyaan sederhana kami untuk nelayan adalah, seperti apa sebenarnya akses nelayan terhadap bahan bakar minyak. Kalau dari data survey KNTI menunjukkan, sebagian besar nelayan kita membeli bahan bakar minyak di eceran. Itu terjadi sebelum ada kenaikan bahan bakar minyak. Jadi, setiap tahun pula nelayan kita sebagian besar bisa dikatakan tidak mendapatkan akses BBM bersubsidi itu,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam wawancara pada 4 Juni 2024.

Dari fakta ini, artinya meskipun harga BBM naik, sesungguhnya tidak ada efek bagi nelayan bilamana harga BBM bisa dipastikan sama dengan harga yang normal. Karena, sebelum terjadi kenaikan bahan bakar minyak, nelayan sudah membeli BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi 30-40 persen, bahkan bisa 50 persen lebih mahal dari harga normal karena kebiasaan beli di pengecer.

Fakta kedua adalah alokasi BBM bersubsidi nelayan setiap tahun hanya sekitar separuh yang dimanfaatkan, sisanya tidak terserap. Kalau melihat penelitian KNTI bersama Koalisi Kusuka pada tahun 2020 dan 2021 di 10 provinsi dan 25 Kab/Kota, menemukan sebanyak 82,8% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

Infrastruktur dan sarana prasarana untuk BBM ke kampung-kampung nelayan itu tidak mudah. Jumlah SPBUN masih sangat minim. Dari 11.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, yang bisa dirata-rata separuh penduduknya berprofesi sebagai nelayan, data Pertamina merekam, hanya ada 388 SPBUN. Jumlah yang jomplang sekali. Keterbatasan ini membuat penyaluran BBM bersubsidi jadi sedikit sehingga sebagian besar nelayan kita tidak bisa mengakses BBM di tempatnya. Mereka harus pergi membeli, entah ke pulau lain, ataukah dia harus ke tempat desa sebelah, dan itu memberikan beban yang besar pada mereka.

Melihat berbagai persoalan yang membelit nelayan ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan program “Solusi Nelayan” atau Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program ini adalah program bersama yang disepakati oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina untuk memenuhi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar maupun produk Pertamina lainnya bagi nelayan anggota koperasi.





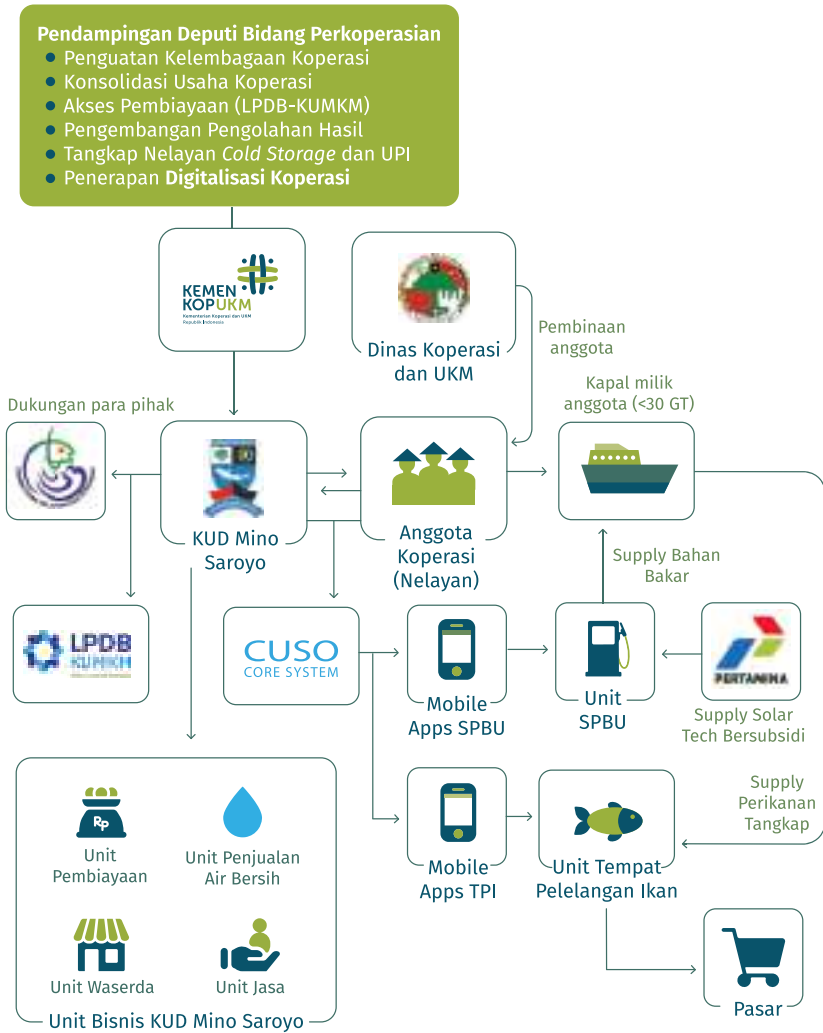
Nelayan, sektor produktif strategis yang mendapat alokasi subsidi BBM, seperti nelayan dari pantai Indramayu yang fotnya diambil pada Mei 2024. (Sumber: KemenKopUKM).

Untuk program Solusi Nelayan ini, KemenKopUKM menunjuk Koperasi Mino Saroyo sebagai koperasi nelayan percontohan. Para pengurus dan pengelola koperasi nelayan difasilitasi untuk melaksanakan magang di koperasi tersebut.

Untuk tahap awal, Solusi Nelayan dilaksanakan pada tujuh Lokasi percontohan, yakni Aceh Besar (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Rencananya sampai tahun 2025, target koperasi nelayan yang bisa terwujud sebanyak 250 koperasi. Sementara sepanjang tahun 2024, target yang dicanangkan sebanyak 150 koperasi.

Namun, hal yang harus dihindari dari pelaksanaan program ini adalah bagaimana tidak terjebak bahwa program Solusi Nelayan ini bukan sekedar membuat koperasi memiliki bisnis pom bensin. Tidak sekedar itu. Karena pom bensin, atau bisnis BBM bersubsidi itu hanyalah sekedar 'gula-gula' saja, bukan yang menjadi esensi program.

Korporatisasi Nelayan Berbasis Koperasi



Manfaat Digitalisasi Koperasi

- Memastikan nelayan anggota koperasi tercatat di database koperasi.
- Proses transaksi anggota dengan layanan koperasi dari pemanfaatan BBM dengan hasil tangkap di TPI (produktivitas nelayan) tercatat baik.
- Adanya promosi ekonomi anggota berdasarkan aktif anggota. Adanya nilai tambah sebagai anggota koperasi.

Infografis 1.4 : Korporatisasi Nelayan Berbasis Koperasi

Kalau dalam kerangka inisiatif solusi, koperasi bukan jualan BBM. Melainkan, koperasi berkepentingan untuk meningkatkan produktivitas anggota-anggotanya dengan cara menyediakan akses BBM. “Mungkin banyak kita temukan sebelumnya bahwa ada koperasi yang didirikan karena ingin jual BBM tapi dia tidak peduli apakah nelayannya sejahtera atau tidak, apakah nelayannya menangkap ikan atau tidak. Karena, fokusnya hanya berjualan BBM. Namun, dalam Solusi Nelayan, BBM itu bukanlah puncak dari bisnisnya koperasi, karena tujuan utama koperasi adalah agar bisa mengonsolidasikan nelayan-nelayan perorangan sehingga mereka berkelompok dalam koperasi,” papar Riza Damanik.

Dalam hal ini, KemenKopUKM berperan dalam penerapan digitalisasi koperasi, akses pembiayaan (LPDB KUMKM), penguatan kelembagaan koperasi, konsolidasi usaha koperasi serta pengolahan Hasil Tangkap Nelayan melalui *Cold Storage* dan UPI (Unit Pelelangan Ikan).

KOPERASI PETANI BERBASIS SMART FARMING

Di pegunungan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, yang merupakan salah satu sentra komoditas tanaman pangan dan hortikultura, terdapat Koperasi Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq atau biasa dikenal dengan Kopontren Alif yang kiprahnya sudah menyentuh banyak petani kecil.

Berdiri secara legal pada tahun 1997, namun kegiatan agribisnis dan agri-preneur yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar sudah dimulai sejak tahun 1970. Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjadi pesantren pertanian hingga seperti sekarang, berawal dari memberdayakan lahan subur di sekitar yang selama ini tidak digarap.

“Pada Kopontren Al Ittifaq, sebenarnya koperasi sudah berjalan, hanya bisnis modelnya yang kita dandani,” ucap Menteri Teten saat diskusi di KemenKopUKM, Jakarta, pada 4 Juni 2024. Menurut Menteri Teten, KemenKopUKM mendandani Kopontren Al ittifaq dalam dua hal, yaitu mengembangkan pertanian terencana serta *pre financing*, yaitu menyuntikkan dana ke koperasi untuk membeli hasil pertanian petani.

“Hal tersebut dilakukan supaya koperasinya menjadi betul-betul menjadi pengganti tengkulak. Jadi, koperasi membeli 100 persen komoditas petani secara tunai, lalu koperasi menjualnya ke market, seperti Super Indo dan lainnya,”

ujar Menteri Teten.

Dengan cara seperti ini, bank yang tadinya tidak mau membiayai pertanian kecil, jadi mau karena sudah ada pembelinya. Di sini ada kepastian harga dan pasar. “Begitu pun koperasi, jadi berani membeli komoditas petani 100 persen karena apa yang ditanam petani dari varietas produknya, volume, waktu panennya, sudah disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi *nggak* ada isu *oversupply*, barangnya tidak sesuai dengan pasar, dan sebagainya,” kata Menteri Teten





Infografis I.5 : Alur Rantai Pasok Kopontren AlIttifaq



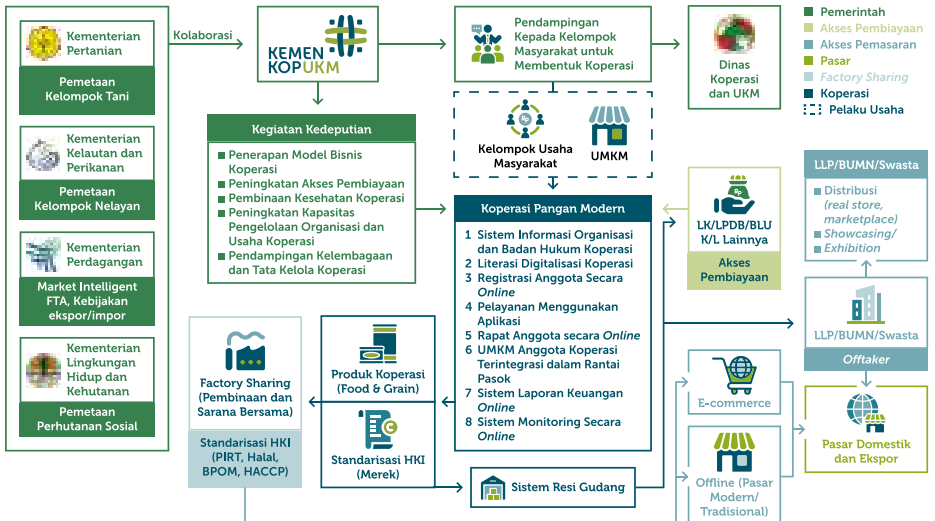
Kopontren Alif menghasilkan komoditas unggulan seperti jeruk dekopon, horengo (bayam Jepang), cabai, wortel shin kuroda, *butternut pumpkin* (labu madu), dan jagung, serta usaha peternakan sapi dan domba. Selain penjualan *offline* ke sejumlah supermarket seperti Super Indo, Yogya Supermarket dan AEON, Kopontren Al-Ittifaq juga menjual produknya secara *online* melalui unit usahanya yaitu Alifmart.

Kopontren Al Ittifaq adalah *role model* dari koperasi modern sektor riil yang bergerak di sektor pangan. Dalam pengembangannya, Kopontren Al Ittifaq melibatkan banyak pihak, mulai dari KemenKopUKM, Diskus Provinsi Jabar, LPDB KUKM, Kementan, Telkom hingga PUM (Belanda) dan JICA (Jepang).

Yanti Sopariah, petani di Kopontren Al-Ittifaq.
(Sumber. Dok Kopontren Al-Ittifaq)

Dalam pengembangan koperasi pangan lainnya, KemenKopUKM memiliki skema model bisnis seperti berikut:

Model Bisnis Pengembangan Koperasi Pangan



Infografis I.6 : Model Bisnis Pengembangan Koperasi Pangan

Dari grafis di atas dapat tergambar peran KemenKopUKM dalam mengembangkan koperasi pangan adalah melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi.

Jika telah terbentuk koperasi, maka KemenKopUKM akan meningkatkan akses pembiayaan, pembinaan kesehatan koperasi, peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi, yang tujuannya adalah mendorong koperasi pangan modern.

Baik KUD Mino Saroyo maupun Kopontren Al-Ittifaq merupakan contoh koperasi modern yang mendekati konsep ideal koperasi sebagai pembeli utama atau *offtaker*, agregator atau konsolidator lalu terhubung dengan pasar atau *buyer*.

KOPERASI BERBASIS TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN*

Koperasi pangan lainnya yang juga menarik adalah Koperasi Tumbuh Bersama Pembudidaya yang merupakan koperasi dengan anggota para penambak dan pembudidaya ikan lele dan udang yang *collabs* dengan *startup* yaitu *eFishery*. Sektor usaha *eFishery* adalah *supplier* pakan ikan dan udang, penyedia sarana teknologi, *platform* digital dan *e-commerce*.

Berbeda dengan KUD Mino Saroyo dan Kopontren Al-Ittifaq, yang anggotanya hanya terdiri dari satu pihak yaitu nelayan atau petani yang bertindak sebagai produsen, Koperasi Multi Pihak Tumbuh Bersama Pembudidaya dengan CEO dan Co-founder Gibran Huzaifah ini, merupakan gabungan dari beberapa *stakeholder* yang disatukan dengan kepentingan yang sama, yaitu koperasi.



Koperasi Multi Pihak Tumbuh Bersama Pembudidaya, koperasi berbasis digital.
(Sumber: eFishery)



Digitalisasi koperasi mempermudah transaksi di TPI milik KUD Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah.

Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) Firdaus Putra juga menilai peluncuran Koperasi Multi Pihak Tumbuh Bersama Pembudidaya oleh *startup* akuakultur berbasis teknologi eFishery merupakan langkah positif dan memberi implikasi positif.

Menurut Firdaus, ekosistem dalam rantai pasok industri perikanan ini melintang panjang dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembudidaya, agen pakan, buyer, dan supplier. Sudah tepat eFishery bertindak sebagai lembaga jangkar dan menjahit semuanya dengan koperasi multi pihak (KMP). (Antara, 13/10/2023)

KUD Mino Saroyo, Kopontren Al-Ittifaq dan Koperasi Multi Pihak Tumbuh Bersama Pembudidaya merupakan contoh koperasi-koperasi di sektor pangan yang tumbuh dengan kekhasannya masing-masing.

KUD Mino Saroyo misalnya, merupakan koperasi konvensional, yang bertransformasi menjadi koperasi modern dengan digitalisasinya, Kopontren Al-Ittifaq merupakan koperasi yang proses bisnisnya mencakup dari hulu hingga hilir yang didukung sistem agro digital (*smart farming*). Sementara Koperasi Multi Pihak Tumbuh Bersama Pembudidaya merupakan koperasi



Koperasi Multi Pihak, memudahkan hidup petani kecil berlahan sempit. (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

multi pihak atau multi stakeholder, berbasis blockchain sehingga anggota koperasinya tersebar di banyak wilayah di Indonesia.

Sebagai informasi, Koperasi Multi Pihak dalam pengertian yang sederhana adalah **koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh lebih dari satu kelompok anggota.**

Ketika pertama kali diperkenalkan ke masyarakat, lewat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021, ada pihak-pihak yang resisten karena menganggapnya sebagai koperasi liberal.

“Sebagian menuding KMP ini liberalisasi. Sebagian lagi menganggap ini tidak sesuai dengan ide koperasinya Bung Hatta, bapak koperasi kita. Padahal, ketika Bung Hatta muda menulis pengalaman koperasi di negara Skandinavia, itu juga sedang dalam tahap awal. Kalau kita lihat perkembangan koperasi di Eropa sekarang, sudah pesat luar biasa. Contohnya koperasi Credit Union. Sekarang sudah jadi bank, dan banknya dimiliki oleh koperasi,” jelas Menteri Teten. Melalui KMP, seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam ekonomi sirkular dijadikan anggota koperasi, sehingga terjadi komitmen bisnis yang jangka panjang. Petani hanya memikirkan produksi, sementara untuk pengolahan, modal, dan pasar, ada pihak lain yang mengurus.

“Contohnya itu Fonterra, si peternak sapi hanya mengurus susu sapi bagaimana menghasilkan susu yang berkualitas. Nah, urusan yang lainnya, seperti mengurus masalah produktivitas susunya, bagaimana dijualnya, itu urusan koperasi.”

ujar Menteri Teten. Sebagai informasi, Fonterra adalah koperasi peternak susu di Selandia Baru yang dimiliki oleh 10.600 peternak Selandia Baru dan menguasai 30 persen ekspor produk susu dunia.

Menteri Teten juga mengatakan, kehadiran KMP bisa memudahkan hidup petani yang selalu dipusingkan urusan modal. “Jika petani tidak memiliki modal produksi, maka koperasi model KMP bisa jadi solusinya karena investor bisa menjadi anggota koperasi dan memberikan suntikan modal. Kalau koperasi petani dibiarkan sendiri tumbuh, akan susah sekali. Tapi kalau ada investor masuk, maka produktivitas meningkat, maka industri yang terkait dalam ekonomi sirkular bisa masuk di situ. Industri akan *happy* karena akan dapat supply yang lebih terjamin.”

Tentang sejarah KMP sendiri, pertama kali didirikan pada 1870 di Inggris dengan nama *Hebden Bridge Fustian Manufacture Co-operative Society*.

“Setelah itu, bermunculan model koperasi ini di negara lain dengan berbagai penyebutan nama di berbagai negara seperti Multi-stakeholder Cooperative (MSC) atau hybrid yang berlaku di Amerika dan Inggris, Social Cooperative di Italia, dan *Solidarity Cooperative* di Kanada,”

jas Firdaus Putra, ketua Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Meski terbilang baru di Indonesia, namun jejak kesuksesan model KMP sudah ada di banyak negara, seperti Korea Selatan (ICOOP), Inggris (ELC), Amerika Serikat (Weaver Street), Spanyol (Eroski) dan Stocksy (Kanada).

Selain mendapat akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas, yang paling menonjol dari KMP adalah prinsip inklusif dan pemberdayaanya. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, investor dan masyarakat, koperasi dapat lebih efektif dalam memberdayakan anggotanya, terutama mereka yang berada di pedesaan dan daerah terpencil.





RPB dilengkapi dengan peralatan dan teknologi modern. (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

MEMBANGUN FONDASI INDUSTRI MELALUI RUMAH PRODUKSI BERSAMA (RPB)

Rumah Produksi Bersama (RPB) merupakan program yang diinisiasi KemenKopUKM untuk mengonsolidasikan UMKM ke dalam satu tempat untuk melakukan aktivitas produksi bersama. Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 5 Tahun 2022, Rumah Produksi Bersama (RPB) adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi.

“Konsep RPB lahir dari pemikiran bagaimana menumbuhkan industri menengah dari UMKM. Industri menengah yang mengolah bahan mentah keunggulan lokal menjadi barang setengah jadi yang bisa masuk ke rantai pasok industri besar ini bisa menjadi fondasi industri kita. Misalnya, bahan setengah jadi dari lidah buaya untuk memasok kebutuhan industri kosmetika atau produksi minyak nilam untuk industri parfum dunia,”

ujar Menteri Teten sambil mengatakan konsep ini sudah diwujudkan lewat program Rumah Produksi Bersama yang diinisiasi KemenKopUKM sejak tahun 2022.

Penumbuhan industri menengah tentu bisa dijangkau oleh UMKM, mengingat kapital yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Selain itu, teknologi yang dibutuhkan juga termasuk teknologi yang mudah, lebih murah, termasuk kemungkinan diciptakan teknologi-teknologi baru karena selama ini kualitas produk UMKM dipandang rendah dan kalah bersaing karena tidak mampu untuk mengakses teknologi. “Ini adalah potensi untuk UMKM naik kelas, UMKM bisa masuk ke industri dan tidak lagi identik dengan keripik, akik dan batik,” ujar Menteri Teten.

Pertanyaan berikutnya, mengapa harus pabrik bersama? Karena butuh dana yang besar untuk membangun dan mengoperasikan pabrik yang representatif. Dengan RPB yang dilengkapi berbagai fasilitas produksi, maka biaya operasional yang harus dikeluarkan UMKM seperti sewa tempat, peralatan dan utilitas bisa ditekan. UMKM juga bisa mendapatkan akses ke peralatan dan teknologi canggih yang mungkin tidak terjangkau jika dibeli secara individu.

“Kalau membagikan alat sederhana, dikhawatirkan kualitas produk tidak akan meningkat. Maka itu kita bangun pabrik bersama dengan alat-alat modern agar memenuhi standar pabrik,” kata Menteri Teten saat meresmikan RPB di Kabupaten Jembrana, Bali.



Melalui RPB, UMKM juga didorong untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

Mengapa harus bergabung dengan koperasi?

Tentunya karena menguntungkan di antaranya persoalan kurang modal yang menjadi masalah klasik UMKM bisa diatasi dengan mendapatkan akses modal dari koperasi.

Terutama jika UMKM tidak *bankable* dan tidak memenuhi syarat meminjam modal ke bank, maka mereka bisa mendapatkan akses modal dari koperasi. Semakin besar skala koperasi, maka makin besar pula akses modal yang UMKM dapatkan.

Melalui koperasi pula, UMKM dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Belum termasuk kesempatan pendidikan dan pengembangan diri karena koperasi biasanya mendapatkan program pelatihan dan pendampingan dari Kementerian atau Lembaga terkait. Keuntungan lainnya adalah anggota bisa mendapatkan keuntungan dari unit usaha koperasi melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menteri Teten juga menyampaikan bahwa RPB menjadi kebijakan Pemerintah bahwa hilirisasi bukan hanya wilayah usaha besar tapi juga melibatkan UMKM. Selain itu, tujuan RPB adalah untuk memotong jalur para tengkulak.

Melalui RPB, UMKM dapat berkolaborasi dan berbagi ide yang dapat memacu inovasi dan peningkatan produk. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi. Dengan produksi skala besar maka memungkinkan pengurangan biaya per unit sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Selain itu, fasilitas yang dikelola secara profesional juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen waktu, sehingga produktivitas UMKM dapat terjaga. Dan terakhir, Rumah Produksi Bersama juga menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga mereka *update* terhadap tren pasar, dan pengembangan keterampilan yang mendukung peningkatan kualitas produk UMKM.

Tahap pembangunan RPB dimulai dari pendataan komoditas unggulan dari berbagai daerah di Nusantara. Pemetaan yang dilakukan termasuk pengembangan potensi hilirisasi dari komoditas. Dipertimbangkan juga manfaat yang bisa diperoleh masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan adanya RPB ini.

Dana yang digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan Rumah Produksi Bersama berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKM yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah.

Setelah melalui berbagai kajian, RPB pun mulai dibangun secara bertahap. Pada Tahun 2022 dibangun tiga Rumah Produksi Bersama; yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur) untuk mengolah komoditas jahe, Kabupaten Minahasa Selatan (Provinsi Sulawesi Utara) untuk hilirisasi komoditas kelapa, dan Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur) untuk hilirisasi komoditas sapi potong.





RPB Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat) untuk hilirisasi komoditas kulit Foto diambil pada Sabtu (17/2/2023).
(Sumber: Dok. KemenKopUKM)

Pada Tahun 2023, pembangunan RPB dilanjutkan di Kabupaten Batubara (Provinsi Sumatera Utara) untuk hilirisasi komoditas cabai merah; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hilirisasi komoditas susu; Kabupaten Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan) untuk hilirisasi komoditas karet; Kabupaten Jembrana (Provinsi Bali) untuk hilirisasi komoditas kakao; Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Provinsi Sulawesi Selatan) untuk hilirisasi komoditas garam; Kabupaten Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah) untuk komoditas rotan; dan Kabupaten Manggarai Barat (Provinsi NTT) untuk hilirisasi komoditas bambu; dan Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat) untuk hilirisasi komoditas kulit. Di tahun 2024 ini, pembangunan RPB Aceh dengan komoditas nilam akan dilanjutkan setelah sempat ditunda. Total RPB yang telah selesai dan sedang dibangun adalah 13 unit.

Setelah sarana dan prasarana didirikan selanjutnya tugas pemerintah daerah dan koperasi yang memastikan operasional RPB. Pemerintah daerah Provinsi atau kabupaten/kota akan mengalokasikan RPB dalam APBD sebagai bentuk dukungan operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana RPB. Sementara untuk pengelolaan RPB dilakukan oleh koperasi.

Sebenarnya bagian penting dari program RPB adalah bukan sekadar Pembangunan fisik dan penyediaan alat semata. Karena mungkin tidak dengan RPB pun, koperasi dan Pemerintah Daerah mungkin bisa menyediakan bangunan seperti RPB. Namun, seperti dikatakan Asisten Deputi Bidang

Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Ali Alkatiri, sebenarnya yang paling penting dari RPB adalah menggerakkan ekosistem bisnisnya. Di mana koperasi pengelolanya bergerak membangun bisnis, menghubungkan hulu ke hilir. Serta melakukan konsolidasi dari bahan baku hingga pasar yang memanfaatkan hasilnya.

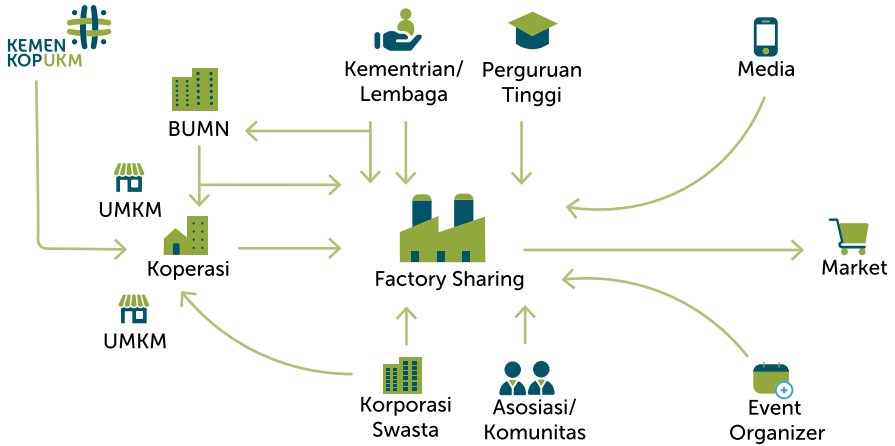
Sesuai tujuan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, RPB menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas di bawah satu atap dan pada komoditas tertentu. Misalnya mungkin ada pelatihan tentang pemasaran, digitalisasi, sertifikasi halal, mengakses kredit, tata cara ekspor dan lainnya.

“Nantinya di RPB tidak cuma berkutat dengan kegiatan pabrik atau produksi produk, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, seperti pelatihan-pelatihan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Agama yang bisa mendukung kemajuan UMKM dan koperasi pengelola RPB.



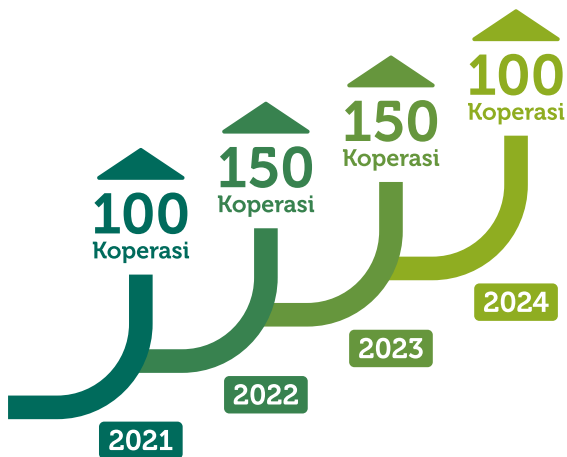
Produk yang berkualitas dihasilkan oleh UMKM di RPB Garut, Jawa Barat. Foto diambil pada Sabtu (17/2/2024). (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

Skema RPB



Infografis I.7 : Skema RPB

Target Penumbuhan Koperasi Modern 2021-2024



Infografis I.8 : Target Penumbuhan Koperasi Modern 2021-2024

Dari bagan tergambar peran KemenKopUKM yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Media. Lalu KemenKopUKM akan mendorong UKM-UKM untuk bergabung bersama koperasi dalam mengelola RPB untuk kemudian menghasilkan produk jadi yang siap dilempar ke pasar. Dalam pendanaan, RPB akan mendapatkan dana dari BUMN, dan korporasi swasta. Sementara Asosiasi/Komunitas serta *Event Organizer* akan berperan sebagai pendukung yang memberi *insight* atau masukan.

Dengan kolaborasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, UMKM bisa menghasilkan produk yang berkualitas dalam skala yang besar sehingga UMKM bisa naik kelas.

Inovasi-inovasi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan upaya dari KemenKopUKM di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki untuk merealisasikan hadirnya 500 koperasi modern pada 2024.

Tak hanya kehadiran 500 koperasi modern, inovasi juga dilakukan untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB dari 5,1% pada 2019 menjadi 5,5% pada 2024, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.





SUMMARY/RINGKASAN
INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

Pembiayaan Rantai Pasok Untuk Ekosistem Berkelanjutan

2

2

Pembiayaan Rantai Pasok Untuk Ekosistem Berkelanjutan



“Presiden kerap mengingatkan agar kelembagaan koperasi diperkuat, salah satunya pada koperasi pangan,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat peresmian Koperasi Perjuangan Usaha Tani Jombang, Jawa Timur yang merupakan transformasi dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sugihwaras, Jombang pada Kamis (1/10/2020)⁽⁶⁾

SKEMA PRE FINANCING BAGI KOPERASI PANGAN

Pasca didera pandemi Covid19 yang hingga saat ini masih dalam upaya pemulihan, peringatan lain datang dari Organisasi Pertanian dan Pangan (Food and Agriculture Organization/FAO) pada peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2022 bahwa ketahanan pangan global sedang dalam ancaman.

Melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk telah meningkatkan kekhawatiran akan ketahanan pangan secara global, terlebih karena krisis iklim dan konflik yang tak kunjung selesai, seperti perang Rusia dan Ukraina. “Jika tidak ada tindakan yang diambil, 970.000 orang berisiko kelaparan di Afghanistan, Etiopia, Somalia, Sudan Selatan, dan Yaman, jumlah orang yang menghadapi kelaparan di seluruh dunia terus meningkat,” tulis FAO dalam keterangan resmi, Minggu (16/10/2022).⁽⁷⁾



Presiden Jokowi dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi Kopontren Al Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat untuk melihat secara langsung sistem *smart farming* yang dikembangkan koperasi. (Sumber: Dok. KemenKopUKM)



Petani sayur di Ciwidey, Bandung yang tergabung dalam kopontren Alif. Foto: dok. Humas KemenKopUKM

Di akun Instagramnya @jokowi yang diunggah bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Minggu (16/10/2022), Presiden Joko Widodo menuliskan bahwa berbagai prediksi tentang situasi global yang sama bahwa banyak negara di dunia yang rakyatnya terancam menghadapi kerawanan pangan akut. Hampir tiga tahun pandemi, lalu konflik dan perang Ukraina, telah membawa dampak krisis ekonomi, energi, dan pangan ke seluruh dunia.

Sebelum diperingatkan FAO, ketahanan pangan telah menjadi fokus dalam Kebijakan Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Apalagi pada tahun 2020, indeks ketahanan pangan Indonesia yang terdiri dari tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas dan keamanan, berada di peringkat 62. Koperasi memiliki peran penting dalam upaya menguatkan ketahanan pangan ini.

Di mana perannya? Tak lain karena tantangan di lapangan adalah petani, peternak, pekebun maupun nelayan, mereka-mereka yang berada di sektor produktif ini memiliki skala usaha yang masih kecil-kecil dan perorangan.

“Korporatisasi petani yang mengagregasi agar mereka bisa mencapai skala ekonomi bisa dilakukan lewat koperasi. Hal ini yang belum terjadi sebelumnya. Memang ada Gapoktan, namun mereka bukan organisasi formal sehingga tidak bankable,”

ujar Menteri Teten Masduki dalam diskusi internal pada 4 Juni 2024 di Jakarta.

Karena itu, para pelaku usaha mikro dan kecil yang didominasi kalangan *grassroot* harus dikuatkan agar usaha-usaha mereka tidak hanya sekedar untuk *survival*. Untuk itulah Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program korporatisasi dengan melakukan agregasi pelaku usaha.

Pada akhirnya, korporatisasi petani ini memungkinkan mereka mempunyai akses pembiayaan yang bisa digunakan untuk mengelola rantai pasoknya. Selama ini, karena bekerja sendiri-sendiri, penjualan hasil panen petani tergantung pada tengkulak. Di sinilah terjadi ketimpangan, karena hasil-hasil pertanian dihargai sangat murah oleh tengkulak, sementara



Aktivitas di Kopontren Al Ittifaq dalam proses memilih dan packing hasil tani, sebelum dikirim ke pasar modern. (Sumber: Dok. Al Ittifaq).

biaya produksi termasuk ongkos transportasi untuk mengangkut hasil panen padi ke pasar, juga meningkat. Di sisi lain, mereka juga tercekik oleh biaya hidup sehari-hari yang melambung tinggi. Pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang inilah yang membuat hidup petani jauh dari kata sejahtera.

Tengkulak yang tidak ikut berkeringat di sawah ladang justru meraup untung jauh lebih besar karena mereka bisa menjual ke ritel dengan harga yang tinggi. Karena itu, penguasaan rantai pasok dari hulu ke hilir oleh petani yang terkonsolidasi dalam koperasi akan meningkatkan daya tawar mereka. Koperasi yang bisa memutus peran tengkulak dan menggantikannya dengan menjadi pengepul (*offtaker*) produk petani.

Model bisnis koperasi yang dikembangkan KemenKopUKM bersama Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah korporatisasi. **Secara sederhana alurnya adalah petani menjual produk ke koperasi, koperasi ini kemudian mengolah padi menjadi beras. Koperasi yang kemudian mengurus penjualan. Suntikan dana diberikan kepada koperasi agar bisa membayar hasil produksi anggotanya, mengingat market atau pasar umumnya melakukan pembayaran mundur, yang tentu bila tidak dicarikan solusi akan memberatkan petani yang memiliki keterbatasan dana.**

Melalui skema baru ini, dana bergulir di LPDB bisa bersinergi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian. Ujung dari transformasi ini adalah bagaimana korporatisasi petani berbasis koperasi bisa menjamin ketahanan pangan nasional, seperti yang selalu ditegaskan Presiden Joko Widodo.

Hal ini sudah dilakukan oleh Kopontren Al-Ittifaq di Bandung. Koperasi berperan sebagai pengepul yang tentu membutuhkan modal besar. **“Kami menjadikan mereka pertanian rencana lalu kemudian ada refinancing yang kita suntikan ke koperasi,”** kata Menteri Teten.

Pengembangan Kopontren Al-Ittifaq ini sebetulnya bentuk dari model pembiayaan Farmer Producer Organisation (FPO) yang berhasil dikembangkan di India. Lewat skema FPO, petani di India secara kolektif meningkatkan skala ekonomi usaha pertanian mereka dengan mengelola tiga tahapan yaitu *pre production, production* dan *post production*.

Tabel II.1 : Pembiayaan Penguatan Koperasi



Di India, jumlah anggota FPO berada pada kisaran 50 hingga 1.000 anggota dan skema ini menjadi alternatif pembiayaan UMKM yang melibatkan mitra usaha petani yaitu koperasi yang menjadi *offtaker* dan memiliki pembeli produk mereka.

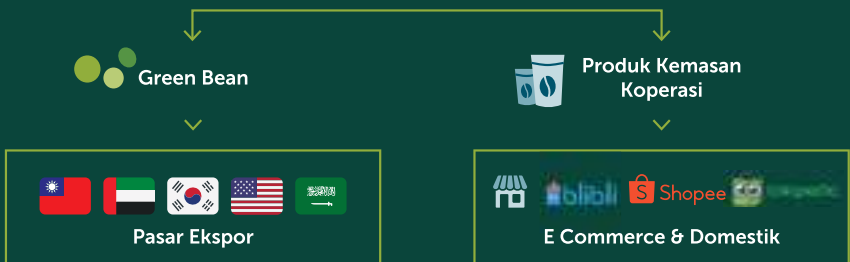
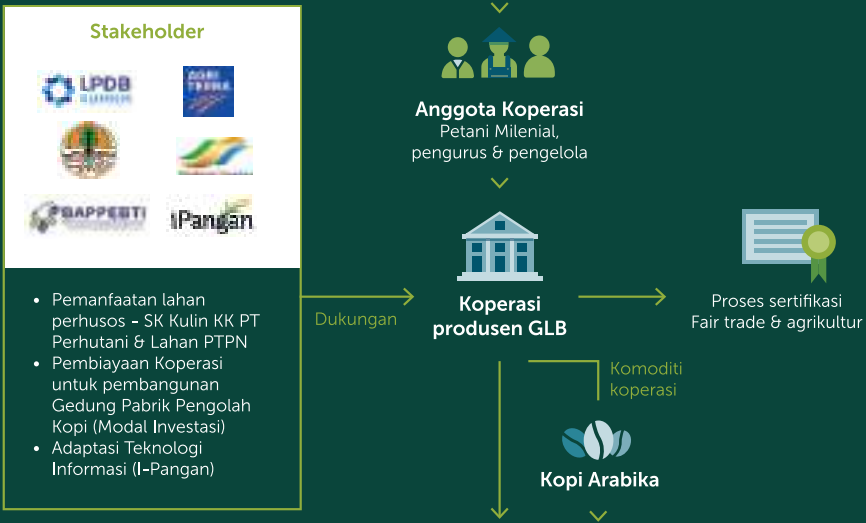
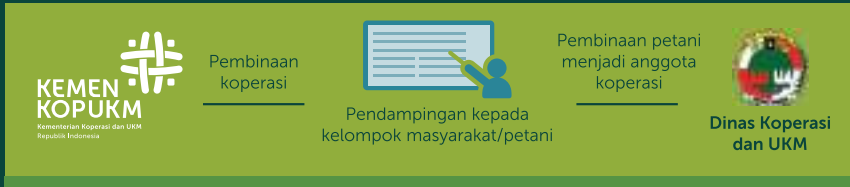
Skema FPO seperti yang diterapkan di Kopontren Al-Ittifaq sejalan dengan inovasi pembiayaan UMKM Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki. Badan Layanan Usaha LPDB-KUMKM yang melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi dan UMKM dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan lainnya, sejak 2020 didorong untuk fokus pada pembiayaan koperasi sektor riil. Tujuannya tidak lain membuat koperasi naik kelas.

“Konsep ini seperti *pre-financing* yang dilakukan Amerika Serikat untuk komoditas gandum guna mendukung ketahanan pangan nasional mereka. Petani gandum bisa mengambil pinjaman terlebih dahulu untuk memulai produksi. Embrionya kini sudah dilakukan lewat LPDB dan meski *piloting project* baru sedikit namun sudah kelihatan bahwa kita sebenarnya bisa membangun *pre financing* melalui koperasi,” kata Menteri Teten Masduki. Skema ini menjadi program strategis Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya untuk mendukung nelayan dan petani.

Koperasi Gunung Luhur Berkah (GLB) yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat juga menjadi koperasi yang dimodernkan melalui korporatisasi petani. Koperasi GLB bergerak di bidang produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan perkebunan, khususnya kopi. Dikelola oleh pengurus koperasi dari generasi millennial, mereka memanfaatkan lahan Perhutani seluas 1.200 hektar. Menjadi bagian dari target pembentukan koperasi modern, untuk pembiayaan, LPDB menyuntikkan dananya.

Kopi yang diproduksi oleh Koperasi GLB ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mereka mengurus dari mulai menangkan bibit kopi bersertifikat, pendampingan anggota pada penanaman, pengolahan pasca panen hingga pemasaran. Produk kopi produksi koperasi ini sudah merambah pasar luar negeri seperti Taiwan, Korea Selatan, Amerika, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Model Pengembangan Koperasi Gunung Luhur Berkah



Infografis II.1 : Model Pengembangan Koperasi Gunung Luhur Berkah

KUR KLASTER UNTUK PERKUAT KEMITRAAN UMKM DENGAN USAHA BESAR

Terobosan lain untuk penguatan ekonomi rakyat berbasis rantai pasok adalah **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, dalam hal ini adalah **KUR Klaster**. Seperti yang kita ketahui, sejak 2007 Pemerintah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperlebar akses UMKM terhadap kredit perbankan melalui skema penjaminan kredit parsial (*partial credit guarantee scheme*) yang diberikan secara otomatis (*automatic guarantee*).

Peningkatan akses UMKM terhadap kredit perbankan melalui KUR ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja UMKM sehingga bisa lebih berperan dalam memperluas kesempatan kerja, menciptakan sumber pendapatan, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Jenis-jenis KUR yang ada adalah KUR Super Mikro (plafon Rp10 juta), KUR Mikro (plafon hingga Rp50 juta), KUR Kecil (antara Rp50 juta - Rp100 juta), KUR TKI (plafon sampai dengan Rp25 juta) dan KUR Khusus yang disalurkan dengan sistem Klaster dengan plafon antara Rp50 juta - Rp500 juta. Untuk sektor usaha pangan dapat dikembangkan peningkatan produktivitas dalam wadah koperasi. Karena itu, penyaluran pembiayaan yang selama ini lebih banyak di sektor perdagangan bergeser ke sektor produksi prioritas yakni pertanian, perkebunan, pertanian, dan peternakan.

KUR Klaster ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, KUR Klaster merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga ada kepastian pasar bagi pelaku UMKM karena *offtaker* atau pembelinya sudah jelas. Pengelolaan UMKM secara kelompok juga memudahkan perbankan melakukan proses *monitoring*.

Salah satu yang berhasil meningkatkan usaha kecil mereka adalah klaster peternak Penggemukan Domba Nurul

Hidayah di Garut, Jawa Barat. Wasid, salah satu peternak bersama rekan-rekannya membuat klaster peternak domba yang beranggota delapan orang. Mengapa harus delapan orang?

Menurut Wahid, yang ditemui di rumahnya pada Mei 2024, pada waktu itu pagu pinjaman KUR yang disediakan Bank Jawa Barat (BJB) selaku penyalur dana sebesar hanya 25 juta rupiah untuk setiap peternak. Dengan membuat kelompok klaster yang beranggota delapan orang, Bank BJB dapat menyalurkan Rp200 juta untuk setiap kelompok.



Peternak Penggemukan Domba Nurul Hidayah di Garut, Jawa Barat yang kian berkembang dengan KUR Klaster. (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

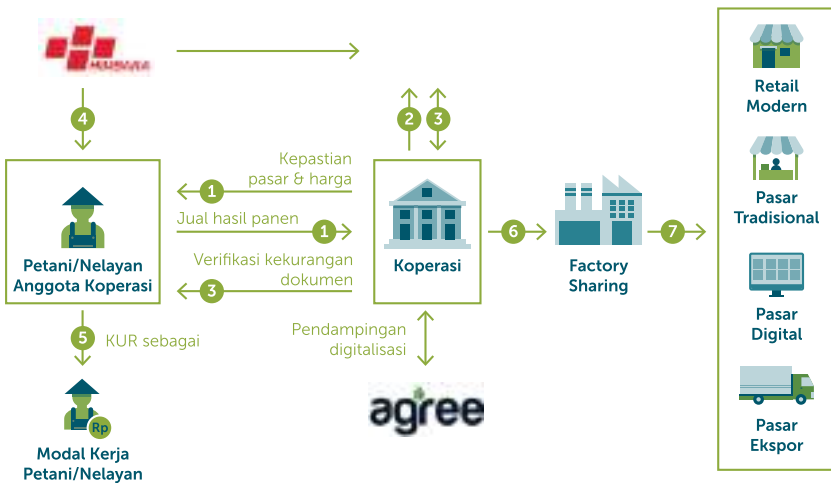
Setelah semua rencana dipersiapkan matang Wasid pun dipertemukan dengan Agro Investama selaku *offtaker* yang akan menjamin kelangsungan peternakan domba Wasid dan kelompoknya; mulai dari penyediaan bakalan anak domba, pakan, hingga pendampingan. Setelah itu Wasid dan kelompoknya dipertemukan pula dengan pihak Bank BJB. Kesepakatan pun ditandatangani dan Wasid akhirnya dapat mewujudkan mimpinya sebagai anggota kelompok peternak klaster penggemukan domba di desanya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran KUR, seperti analisis kelayakan kredit sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman. Agar ini terwujud, perlu ada kolaborasi dengan *platform* digital.

Sampai dengan saat ini telah terealisasi KUR Klaster berbasis Rantai Pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 klaster. Anggota klaster mencapai 5.310 UMKM oleh sembilan Penyalur KUR. secara total, **ekspektasi yang akan ikut dalam skema KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp1,34 triliun, yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM.**

KUR Klaster diharapkan dapat memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga UMKM bisa naik kelas. Saat ini, memperluas kemitraan dengan perusahaan besar menjadi prioritas agar KUR Klaster makin meluas pengembangannya.

Skema Penyaluran KUR Klaster kepada Anggota Koperasi Pangan Modern



Pengajuan KUR

- Petani melengkapi dokumen seperti KTP & KK, sertifikat kelompok kolektif, Rekomendasi dr Koperasi dll
- Petugas Bank melakukan survei: Verifikasi data & Usaha
- Proses Analisa oleh pihak bank
- Persetujuan kredit & Penandatanganan Perjanjian kredit
- Fasilitas KUR dicairkan dalam bentuk kartu tani terkoneksi dengan system RDKK terintegrasi

Infografis 11.2 : Skema Penyaluran KUR Klaster kepada Anggota Koperasi Pangan Modern

Faktor yang membuat Wasid dan kelompoknya berhasil tidak lain adalah terjalannya kerjasama tripartit antar pihak yang saling berkontribusi.

Wasid yang tidak memiliki modal bahkan pengetahuan untuk beternak domba mendapat dukungan penuh pihak lain, baik itu Bank BJB yang menyalurkan dana untuk modal, maupun Agro Investama yang memberikan jaminan rantai pasok—mulai dari bakalan domba, hingga pendampingan untuk menambah keterampilan bagi peternak yang belum memiliki kecakapan dan pengalaman dalam penggemukan domba.

Sinergi antara kelompok peternak klaster, penyalur dana dan oftaker semacam inilah yang dapat memberikan harapan bagi tumbuhnya koperasi yang ideal di masa mendatang. Dengan ekosistem semacam ini program KUR Klaster yang menjadi salah satu skema dalam transformasi pembiayaan UMKM bisa terwujud. Sehingga, tujuan KUR Klaster dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat diterapkan.

Namun belajar dari pengalaman, model koperasi yang berafiliasi dengan investor (*FPC/Farmer Producer Company*) bisa menjadi kurang efektif karena beberapa faktor seperti:

- 1) rendahnya komitmen anggota koperasi untuk bekerjasama;
- 2) bergantung pada bantuan dari pemerintah atau pendanaan dari lembaga keuangan;
- 3) terdapat campur tangan politik
- 4) terjadi konflik kepentingan di dalam koperasi yang menimbulkan penggelapan anggaran dan korupsi.





SUMMARY/RINGKASAN
INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

**Menguatkan
Sumber Daya
Wirausaha dengan
Entrepreneur Hub
dan Inkubasi**

3

3

Menguatkan Sumber Daya Wirausaha dengan *Entrepreneur Hub* dan Inkubasi



Peluang untuk menumbuhkan *entrepreneur* baru **diharapkan bisa menciptakan ekonomi baru apalagi didukung oleh fakta-fakta bahwa Indonesia merupakan 'gudang' *startup* atau usaha rintisan.**



Menteri Koperasi dan UMKM saat meluncurkan Entrepreneur Hub untuk pengembangan ekosistem kewirausahaan. Foto diambil di Jakarta, pada Sabtu, (5/4/2023). (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan /atau mengembangkan suatu usaha. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 3 Januari ini menjadi terobosan untuk melakukan percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan di tanah air.

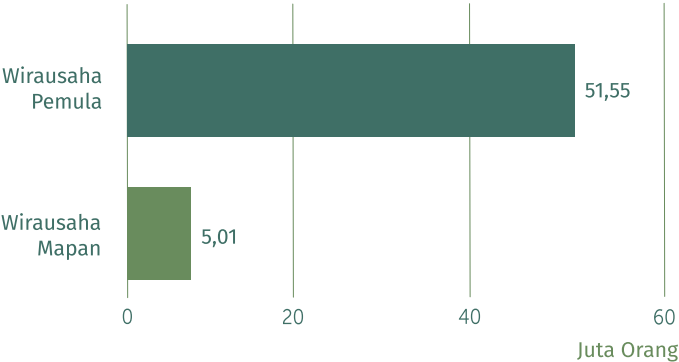
Jumlah wirausaha di Indonesia berdasarkan data BPS 2024 sekitar **56,56 juta orang**, setara dengan **37,86% dari angkatan kerja nasional** yang totalnya sekitar 149,38 juta orang dengan **mayoritas pengusaha pemula yang berjumlah 51,55 juta orang (34,51% & dari total angkatan kerja)**, selebihnya pengusaha mapan sebanyak 5,01 juta orang (3,35% dari total angkatan kerja).⁽⁸⁾

Rasio kewirausahaan masih terhitung rendah. Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%⁽⁹⁾

Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kewirausahaan nasional selama periode 2021-2024. Dalam Perpres ini tertuang mengenai kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha baik yang sudah menjalankan usahanya maupun yang baru merintis sebagai wirausaha. Kemudahan tersebut mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik; fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor; akses pembiayaan dan penjaminan; pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diatur juga tentang juga kemudahan untuk mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan riset dan pengembangan usaha; serta mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis.

Grafik III.1 : Jumlah Wirausaha di Indonesia



Potensi untuk mengembangkan wirausaha untuk menciptakan ekonomi sangat besar, apalagi didukung oleh fakta-fakta bahwa Indonesia menempati posisi ke-6 secara global dan ranking ke-1 di Asia Tenggara sebagai negara dengan *startup* terbanyak, serta anak-anak muda saat ini yang lebih tertarik untuk menjadi wirausaha dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Hal pertama yang dilakukan KemenKopUKM dalam menguatkan sumber daya kewirausahaan adalah dengan melakukan pemetaan yang menyorot tiga aspek utama yaitu mikro (individu), kebijakan (regulasi) dan makro (ekosistem).

Berangkat dari pemetaan isu tersebut disusunlah peta jalan untuk Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional (RAPKN) dengan target penambahan 1 juta wirausaha baru pada 2024.

Road Map 2022 - 2024

2022

Sosialisasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional

2023

Penumbuhan *Mindset Entrepreneur* dan Pendataan Wirausaha melalui *Platform Entrepreneur Hub*

2024

Penguatan Ekosistem dan Kewirausahaan Nasional

Program pengembangan kewirausahaan yang melibatkan peran dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media (konsep pentahelix). Sehingga perlu dikembangkan ekosistem yang mampu mendukung realisasi dari motivasi berwirausaha melalui pendidikan formal dan non-formal menjadi usaha yang berkembang secara berkelanjutan.

Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan studi banding ke sejumlah negara yang memiliki ekosistem UMKM dan wirausaha yang telah berkembang baik. Negara-negara yang dikunjungi adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Melalui kunjungan tersebut didapat banyak hal baru yang bisa diterapkan di Indonesia seperti pengembangan *startup*, rumah produksi bersama atau *smart factory* di Korea Selatan dan *entrepreneur hub*.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi INNOBIZ. Lembaga yang memberikan sertifikasi inovasi. (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

ENTREPRENEUR HUB, SOLUSI JADI WIRAUSAHA

Entrepreneur Hub atau Ehub kemudian hadir sebagai amanat dari Perpres Nomor 2 Tahun 2022, yaitu bagaimana bisa menciptakan ekosistem kewirausahaan. Fokusnya setiap tahun juga berkembang. Bila pada tahun 2023 lebih pada menguatkan *mindset*

kewirausahaan, sementara pada tahun 2024 fokus pada penguatan wirausaha. Dengan *Entrepreneur Hub*, maka semua pemangku kepentingan yang bergerak di kewirausahaan bisa dikolaborasikan dengan baik.

Sejak diluncurkan pada 5 April 2023, program *Entrepreneur Hub* telah **memfasilitasi 6.345 wirausaha di 23 kabupaten kota, pada 17 provinsi di Indonesia**, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi bisnis, komunitas, perguruan tinggi, inkubator, akselerator, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) hingga mitra swasta.

Pada tahun 2024 ini tercatat sudah ada 149 kolaborator, baik dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Ekonomi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bappenas, dan Bank Indonesia. Kalangan komunitas seperti Tangan DI Atas, dan asosiasi UMKM.

Serta kalangan swasta seperti United Tractor, Grab, Google, Sampoerna Entrepreneurship Training Center, juga Samsung. Ehub juga berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Kabupaten Bandung, Sorong dan lain-lain. PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu seperti Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara, juga ikut bergabung. Dan yang juga ikut digandeng adalah kalangan perguruan tinggi seperti Universitas Ciputra, Universitas Hasanuddin, Unisa Bali, Universitas Parahyangan Bandung dan masih banyak lagi. Menggandeng perguruan tinggi menjadi penting karena untuk menuju tahun 2045, penduduk produktif akan diisi oleh anak-anak muda dari generasi Z yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Sehingga diharapkan muncul para *entrepreneur* baru dari kalangan mahasiswa.

Selain itu, ekosistem di perguruan tinggi juga mendukung inovasi. Ekosistem kampus yang terdiri dari mahasiswa, staf pengajar bahkan alumni, dapat berkolaborasi menelurkan gagasan-gagasan bisnis dan penemuan baru. Kampus juga memiliki sumber daya yang cukup lengkap seperti laboratorium, perpustakaan dan akademisi yang ahli di berbagai bidang. Sumber daya seperti ini tentunya sangat dibutuhkan oleh wirausaha muda yang sebagian besar minim modal dan keterbatasan pengetahuan.

Melalui kemitraan dengan investor, inkubator kampus juga bisa memberikan akses modal kepada wirausaha baru di bawah binaannya. Pasalnya, investor seringkali lebih tertarik untuk berinvestasi pada *startup* yang berasal dari perguruan tinggi karena dianggap lebih inovatif dan memiliki potensi dalam pengembangan teknologi. Cara seperti ini pula yang dilakukan oleh sejumlah negara seperti Australia dan Belanda yang menggandeng kampus sebagai salah satu inkubator bisnis *startup*.

“Entrepreneur Hub ini merupakan payung dari strategi kewirausahaan yang merupakan mata rantai yang saling terhubung. Mengapa demikian, karena ketika seseorang ingin menjadi wirausaha, maka banyak hal yang ingin atau perlu mereka ketahui, semua itu ada di platform eHub. Bersamaan dengan hal itu, untuk mempercepat mereka bertumbuh, maka ada program inkubasi,”

kata Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah.



Platform eHUB memuat berbagai informasi seputar wirausaha. Foto diambil di Jakarta (5/4/2023). (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

Entrepreneur Hub juga telah berhasil membuka peluang bagi para wirausaha melalui *workshop*, pendampingan, *pitching*, *networking*, hingga *meet investor* yang mampu menghasilkan potensi investasi senilai Rp57 miliar. Tercatat, sebanyak 108 program sukses terselenggara dan menjangkau 793.570 wirausaha, 149 kolaborator dan 62 mentor.

Tabel III.1 : Entrepreneur Hub 2024



Selain sebuah program, Entrepreneur Hub juga merupakan *platform* yang beralamat di ehub.kemenkopukm.go.id. *Platform* ini lahir karena sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, harus ada data wirausaha di Indonesia. Seperti kita tahu, banyak pihak yang melakukan pembinaan dan penguatan wirausaha dengan target dan cara masing-masing sehingga data kewirausahaan Indonesia tersebar di mana-mana. Adanya *platform* Ehub ini bisa menjadi *connector* bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan kewirausahaan. Selain itu, dengan adanya *platform* maka kebutuhan yang diperlukan seorang wirausaha bisa diselesaikan dalam *one click* karena para kolaborator bisa bergabung di sini. Data wirausaha Indonesia

juga sedikit demi sedikit terkumpul, dan per Agustus 2024 ini sudah terkumpul 810.544 data wirausaha Indonesia.

Dari program *Entrepreneur Hub* maupun *platform Ehub* tujuannya adalah mempercepat rasio kewirausahaan sebesar 3,95% dan menumbuhkan wirausaha sebesar 4%. Ini adalah target yang ingin dicapai melalui *Entrepreneur Hub*. Wirausaha Hebat, Indonesia Kuat merupakan slogan yang *Entrepreneur Hub* untuk membangkitkan gairah kewirausahaan di tanah air.

INKUBASI, CARA CEPAT CETAK WIRAUSAHA

Inkubasi usaha yaitu suatu proses pendampingan dan pengembangan usaha yang diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada calon wirausaha/wirausaha pemula yang menjadi peserta inkubasi (tenant). Proses inkubasi berlangsung selama 1-3 tahun.

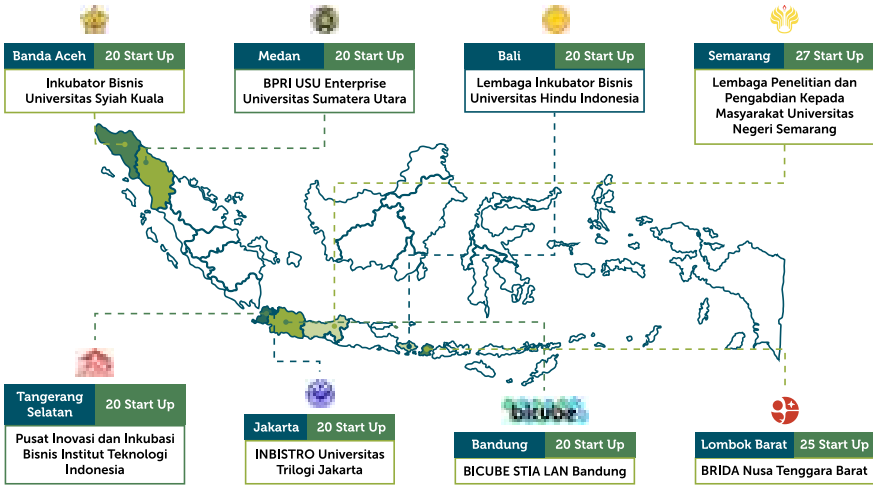
Pedoman pelaksanaan inkubasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa peserta inkubasi yang disebut Tenant adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan atau pelaku usaha/wirausaha pemula

yang menjalani proses inkubasi dan pendampingan dilakukan oleh lembaga inkubator, yaitu suatu lembaga intermediasi yang memberikan layanan inkubasi terhadap peserta inkubasi.

Tujuan inkubasi yaitu menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM, serta mengoptimalkan pemanfaatan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Peta Sebaran Startup Program Pengembangan Startup Tahun 2023



Infografis III.2 : Peta Sebaran Startup Program Pengembangan Startup Tahun 2023

Program inkubasi memiliki dua sasaran strategis. Pertama, mendukung *startup* naik kelas dengan mendorong inovasi, dan memberikan fasilitas untuk *networking* dan akses peluang investasi. Kedua, terealisasinya sebuah kerjasama konkret yang saling menguntungkan antara *startup* dengan mitra *stakeholders* yang telah berkolaborasi dengan KemenKopUKM.

Kriteria *startup* yang mengikuti program inkubasi adalah perusahaan rintisan berbasis teknologi atau menggunakan inovasi teknologi untuk mengembangkan usaha serta memiliki usaha yang sudah berjalan dan berkembang maksimal tiga tahun (memiliki legalitas). Dalam satu angkatan akan dipilih 20 usaha rintisan yang mengikuti program untuk setiap lembaga inkubator.

Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/ atau masyarakat. Tahapan inkubasi dimulai dari seleksi *tenant*, *bootcamp*, *coaching clinic*, hingga *demo day*. Aspek layanan yang diberikan meliputi kegiatan produksi; pemasaran; sumber daya manusia dan manajemen; pembiayaan; dan/atau teknologi dan desain.

Dalam penyelenggaraan selama 2021-2023, program inkubasi pengembangan *startup* berhasil memfasilitasi 351 *startup*. Untuk sebaran daerah pada tahun 2023 bisa dilihat pada infografis III.2:

Langkah-langkah yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam penguatan sumber daya wirausaha juga merupakan upaya untuk transformasi ekonomi digital agar tidak berat di sektor jasa atau *e-commerce* saja. Menteri Teten mengakui, pertumbuhan *startup* yang berat di sisi penjualan atau jasa seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini telah gagal menciptakan ekonomi baru.

Keresahan Menteri Teten mungkin bisa tergambar dalam data. Pada 2023, *startup* yang mengikuti program inkubasi didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa pembiayaan. Tertinggi adalah bidang *food & beverage* dengan jumlah 55 *startup*, diikuti bidang *platform as a service* dengan jumlah 45 *startup*, lalu bidang *craft* dengan jumlah 17 *startup*. Seperti bisa dilihat pada gambar berikut:

Pemetaan Bisnis Peserta Program Pengembangan Startup Tahun 2023



Infografis III.3 : Pemetaan Bisnis Peserta Program Pengembangan Startup Tahun 2023

Data di atas menjadi gambaran kondisi riil pertumbuhan *startup* kita. Namun, sisi positifnya adalah peluang untuk pengembangan *startup* di empat sektor unggulan KemenKopUKM yaitu agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan dan teknologi masih terbuka lebar.

Lantas, *startup* seperti apakah yang menurut Menteri Teten bisa ikut mengubah arah perekonomian Indonesia? Salah satunya adalah “*Startup-startup* yang mampu menjadi agregator bagi usaha-usaha mikro,” tegasnya. Seperti yang dilakukan eFishery, *startup* yang mengagregasi petambak ikan dan udang yang tersebar di seluruh Indonesia ke dalam satu ekosistem digital.

Salah satu wirausaha sektor produksi yang lahir dari program *Entrepreneur Hub* adalah Biopeneer yang berhasil mendapatkan dana hibah dari Korea Selatan sebesar US\$ 7.000 dalam acara Korea-Indonesia Start Up Day bertema “Boosting Future Leaders of Indonesia.”

Produk Biopeneer adalah biopelet yang dihasilkan dari limbah sisa hasil pertanian. Fungsinya sebagai bahan bakar untuk menggantikan kayu bakar.

“Saat ini kapasitas produksinya masih sekitar enam ton seminggu. Pasar biopelet adalah pabrik kecil, menengah dan besar yang membutuhkan pembakaran sebagai proses produksi. Misalnya pabrik pembuatan tahu, kelapa sawit dan gula,”

ucap CEO Biopeneer Sindy Oktaviana.



Pendiri Biopeneer, *startup* yang memproduksi biopelet.

Sindy Oktavia dengan Biopener-nya adalah satu dari target 1 juta wirausaha baru yang dicanangkan KemenKopUKM pada 2024.

“Hingga akhir 2022, strategi yang dirancang oleh Kementerian Koperasi dan UKM, mulai dari program inkubasi usaha, digitalisasi UMKM, konsultasi bisnis dan pendampingan, kegiatan pengembangan kewirausahaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), hingga pendataan lengkap di masing-masing daerah telah menghasilkan 392.847 wirausaha baru,” ungkap Menteri Teten.



Dengan program-program kewirausahaan KemenKopUKM yang lebih banyak menysasar wirausaha pemula, diharapkan akan tumbuh wirausaha-wirausaha mapan yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.



SUMMARY/RINGKASAN
INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

SMESCO, Partner Strategis Koperasi dan UMKM dalam Pemasaran

4

4

SMESCO, Partner Strategis Koperasi dan UMKM dalam Pemasaran



“Badan Layanan Umum (BLU) dapat menjadi **partner strategis dan berkolaborasi dengan koperasi dan UMKM**, sehingga akan terbentuk ekosistem rantai pasok produk ke sektor industri yang saling menguntungkan segenap pihak yang terlibat.”

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.



SMESCO, salah satu BLU di KemenKopUKM yang menjadi sayap dagang koperasi dan UMKM. (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah memperluas akses pasar, baik dalam maupun luar negeri. Tanpa kecakapan memasarkan produk, menghasilkan produk yang berkualitas saja masih belum cukup untuk menjamin kelangsungan usaha, apalagi sampai meningkatkan skala usaha.

Lemahnya pemasaran UMKM Indonesia ditunjukkan dalam survei MSME Empowerment Report yang dilakukan oleh DSInnovative ke 1.500 pelaku UMKM di Indonesia. Dari survei terlihat sebanyak 70% UMKM kesulitan dalam memasarkan produknya, meski sebagian besar dari mereka telah melakukan digitalisasi. (MSME Empowerment Report, 2022).

Tantangan pertama yang dihadapi koperasi dan UMKM adalah membangun *brand image*.

Kesulitan ini sebenarnya bisa dipahami karena pelaku UMKM biasanya fokus memikirkan kualitas produk. Kedua, sumber dana promosi terbatas, sehingga kegiatan-kegiatan promosi hanya dilakukan di media sosial dengan bujet minimalis bahkan tidak berbayar. Ketiga, tak kalah penting adalah tidak memiliki tim pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanan mereka secara efektif⁽¹⁰⁾

Selain kendala, faktor lain yang ikut mempengaruhi kesuksesan pemasaran produk adalah pengetahuan tentang jalur pemasaran hingga kelengkapan dokumen legalitas usaha, seperti sertifikat BPOM, Halal, dan sebagainya.

Kesulitan yang dihadapi koperasi dan UMKM ini dijawab oleh Kementerian Koperasi dan UKM lewat program-program yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada, salah satunya Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau yang lebih dikenal dengan nama *branding* SMESCO Indonesia, yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah KemenKopUKM.

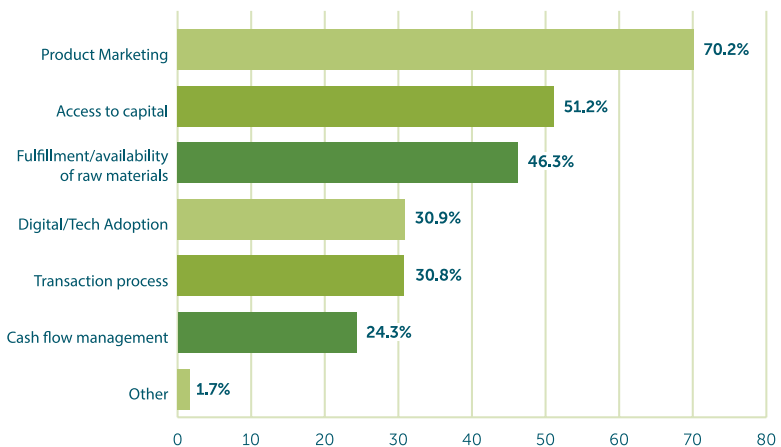


Salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan di gedung SMESCO, Jakarta untuk memperkenalkan produk koperasi dan UMKM. (Sumber: KemenKopUKM).

SMESCO berdiri dan mulai beroperasi pada 2007, berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 19.4/per/M.KUMVII/VII/2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007. Sebagai BLU, SMESCO berperan memberikan layanan promosi dan pemasaran bagi produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM di Indonesia, baik ke pasar domestik maupun internasional.

Dalam menjalankan fungsinya, BLU memiliki orientasi *not-for-profit* karena tujuan utamanya memang bukan untuk mencari keuntungan. Namun, sebagai unit yang memberi pemasukan pada pemerintah, BLU tetap diperbolehkan menerima keuntungan dari penjualan jasanya. Hanya saja tarif layanan yang ditentukan tidak memberatkan pengguna jasa. Surplus berupa PNPB kemudian digunakan kembali untuk meningkatkan kinerja layanan pemasaran dan promosi produk koperasi dan UMKM.

Grafik IV.1 : MSME Empowerment Report



TIGA PERAN SMESCO

Salah satu strategi yang dilancarkan SMESCO untuk menjalankan fungsi promosi dan pemasaran adalah dengan menyiapkan UMKM masa depan (*Future SME*) yang berdaya saing tinggi. Karenanya mulai tahun 2020, SMESCO juga sekaligus menjalankan peran sebagai konsolidator bagi pelaku usaha dalam mengatasi berbagai masalah yang ditemui dalam berbisnis.

Peran ini dituangkan ke dalam dua fungsi SMESCO yaitu sebagai *Center of Excellence* (Pusat Layanan Konsultasi) dan *Trade Arms* (Sayap Dagang), serta fungsi ketiga yang mulai berjalan pada tahun 2024 sebagai *Integrated Startup Hub*.

Sebagai *Center of Excellence*, SMESCO bertugas meningkatkan potensi kewirausahaan pelaku koperasi dan UMKM, sementara sebagai *Trade Arms*, SMESCO fokus menjalankan peran sebagai pelaksana tugas promosi dan pemasaran produk-produk koperasi dan UMKM.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi INNOBIZ. Lembaga yang memberikan sertifikasi inovasi. (Sumber: Dok. KemenKopUKM).

SMESCO SEBAGAI CENTER OF EXCELLENCE

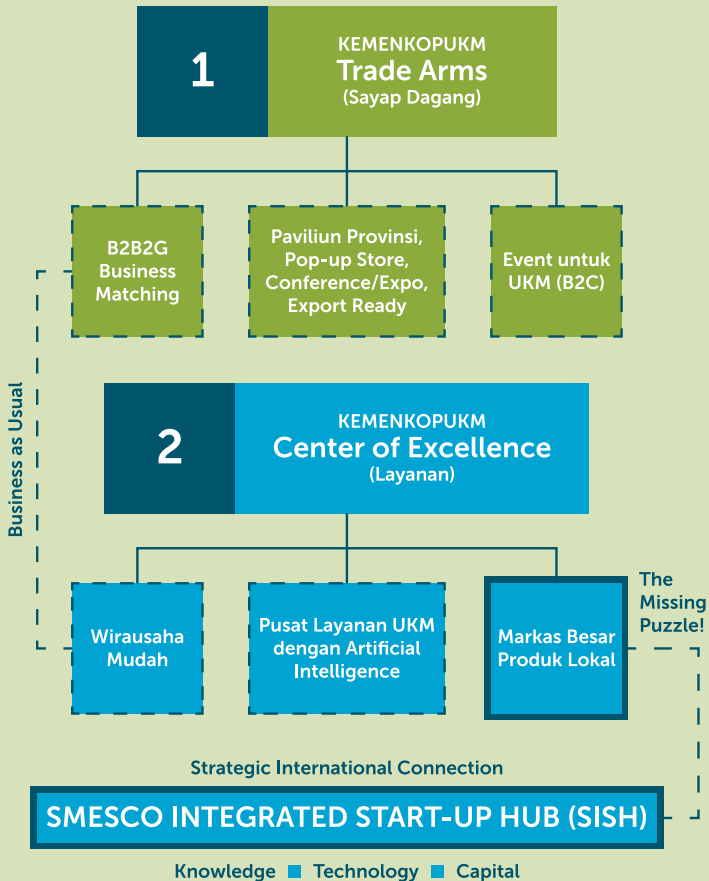
Kegiatan SMESCO meliputi:

Riset dan pengembangan (R&D)

Pengembangan SDM

Penguatan proses produksi

Pemetaan kebutuhan pasar secara holistik.



Agar bisa memberikan informasi dan layanan konsultasi yang tepat sasaran, SMESCO melibatkan banyak tenaga ahli di bidangnya, mulai dari pakar di bidang inovasi dan desain produk, legalitas usaha, sampai konsultan pajak dan pembiayaan usaha.

Salah satu kegiatan SMESCO sebagai Center of Excellence adalah SMESCO Labo, yang merupakan sebuah wadah untuk berkomunikasi, berkreasi, dan bereksperimen bagi para pelaku UMKM. Layaknya sebuah studio atau laboratorium bersama, di SMESCO Labo tersedia fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan eksperimen. SMESCO Labo terdiri dari Makerspace, Food Lab, Garage, dan Studio.

Bukan hanya bisa bereksperimen dan membuat sendiri produk yang akan dijual, pelaku UMKM juga bisa memulai bisnis dengan sistem maklun dengan memanfaatkan layanan SMESCO Labo. Maklun adalah sebuah layanan manufaktur di mana produsen memproduksi produk atas nama merek yang dimiliki oleh pihak lain. Layanan ini memungkinkan seseorang memiliki produk tanpa perlu membuat produknya sendiri

Dalam pengembangan SDM pelaku UMKM, SMESCO melakukan dua pendekatan.

Sesuai arahan Menkop dan UKM, layanan yang diberikan bagi UMKM yang berada di level mikro dan ultra mikro menggunakan prinsip “*low touch-high tech*”. Artinya, bentuk komunikasi dan pendampingan dilakukan dari jarak jauh, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Layanan pendampingan bisa berupa acara webinar, pembuatan konten informasi di media sosial, *newsletter*, juga materi *podcast* agar dapat menjangkau para pelaku koperasi dan UMKM lebih luas.

Sedangkan untuk level menengah, pendekatan SMESCO adalah “*high touch-low tech*”, berupa layanan pendampingan dan inkubasi secara langsung. Harapannya, apabila pelaku usaha menengah bisa berkembang menjadi usaha besar, ia akan dapat berperan sebagai lokomotif dan menarik maju usaha mikro dan ultra mikro.

SMESCO SEBAGAI TRADE OF ARMS

Salah satu kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan secara intensif dan terpadu adalah menggelar event dan display produk-produk unggulan. Selain dilakukan secara mandiri, kegiatan SMESCO juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti JakCloth yang rutin digelar setiap tahun.

Sebagai Trade Arms, SMESCO juga mengadakan pameran dan temu bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai namanya, acara ini digelar untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan buyer yang datang dari lingkup instansi pemerintah. Pertama kali diadakan pada 2022, ajang Pameran dan Temu Bisnis ini berhasil mencetak komitmen belanja produk dalam negeri, Koperasi dan UMKM senilai ratusan triliun rupiah.



Pelaku UMKM mendapatkan bimbingan langsung tentang cara meningkatkan kualitas produk dalam kelas inkubasi SMESCO. (Sumber: Dok. SMESCO)

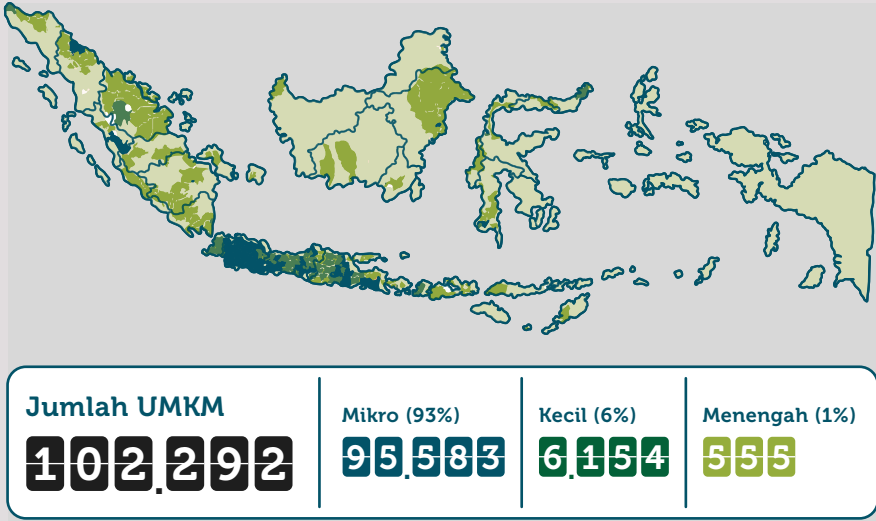
Dalam pembukaan acara pameran dan temu bisnis di Gedung SMESCO pada 11 April 2022, Menteri Teten menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UKM oleh pemerintah.

Tidak sebatas untuk memperkenalkan produk, pelaksanaan *event* promosi yang mayoritas dilakukan di kawasan Gedung SMESCO juga ditujukan untuk lebih menguatkan *branding* SMESCO sebagai BLU yang melayani promosi dan pemasaran produk koperasi dan UMKM. Serta optimalisasi aset SMESCO (penyewaan area kantor dan *ballroom* di kawasan Gedung SMESCO) dan peningkatan omzet penjualan ritel produk koperasi dan UMKM unggulan di Paviliun Provinsi yang berlokasi di lantai 2 Gedung SMESCO.

SMESCO SEBAGAI INTEGRATED STARTUP HUB

Salah satu inovasi yang dilakukan KemenKopUKM di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki adalah pada tahun 2024 membangun ekosistem *startup* yang terintegrasi lewat SMESCO. Dengan memperluas peran SMESCO menjadi *Integrated Startup Hub* atau penyedia layanan pendampingan dan pembinaan untuk mengembangkan ekosistem *startup* lokal.

Tujuannya adalah untuk membantu pertumbuhan *startup* dan membuka akses dengan mitra yang dibutuhkan. Terdapat 500 *startup* yang telah bergabung di KemenKopUKM dari total 2.566 *startup* yang ada di Indonesia. Mengapa SMESCO? “Berhubung sepak terjang pemerintah tidak sefleksibel BLU, maka dirasa penting untuk melanjutkan usaha pembinaan terhadap *startup* ini oleh SMESCO. Jadi, SMESCO menyediakan kebutuhan UMKM seperti ruang kantor dan tempat riset yang bisa diakomodasi oleh SMESCO Labo. SMESCO Labo itu bisa diibaratkan sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tetapi khusus untuk *startup*,” jelas Direktur Utama SMESCO Indonesia Wientor Rah Mada.



Infografis IV.2 : Jumlah UMKM

Dalam rangka meningkatkan penetrasi produk-produk koperasi dan UMKM di pasar domestik dan global, SMESCO terus memperbesar peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok industri melalui kolaborasi dengan banyak pihak, antara lain dengan instansi pemerintah seperti BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Melalui kolaborasi dengan Google dan YouTube, SMESCO juga terus mendorong peningkatan jumlah UMKM yang melakukan transformasi digital. Diharapkan, kerja sama ini mampu mengakselerasi pencapaian target pemerintah untuk mendorong 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital.

KIPRAH SMESCO PERIODE 2019-2024

Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, SMESCO telah melakukan berbagai upaya untuk membuka jalur pemasaran bagi produk-produk koperasi dan UMKM dan membantu agar mereka bisa naik kelas. Meski ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi, namun inovasi-inovasi yang dilakukan dalam sejumlah program SMESCO membuahkan hasil yang menggembirakan.

1. UMKM Mitra yang Terlayani

Selama periode 2020-2023, jumlah total UMKM yang sudah terlayani oleh SMESCO adalah sebanyak **98.330 UMKM.**

2. Kerja Sama dengan Mitra Strategis

Selain menjalin kemitraan pemasaran seperti dengan **SIPPO dan Kimia Farma,** SMESCO juga menjalin kemitraan yang baik dengan banyak pihak lainnya, seperti perjanjian kerja sama operasional jasa pengelolaan perparkiran, penggunaan gerai retail di Gedung SMESCO, penyedia jasa



Produk herbal dan spa UMKM yang dipasarkan melalui Apotek Kimia Farma
(Sumber: Dok. SMESCO)

internet, serta kerja sama operasional lainnya untuk mendorong memajukan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan koperasi dan UMKM.

3. UMKM yang Terfasilitasi Perizinan dan Standarisasi

Mulai tahun 2021, SMESCO menyediakan layanan komprehensif untuk mengurus sertifikasi dan perizinan usaha seperti

NIB, sertifikat Halal, dan HAKI dalam bentuk kegiatan pendampingan, bimbingan, dan konsultasi.

Hingga akhir tahun 2023, jumlah UMKM yang terlayani untuk pembuatan sertifikat perizinan adalah sebagai berikut:

Sertifikasi BPOM: 66 UMKM

Sertifikasi Halal: 250 UMKM

Fasilitasi HAKI: 346 UMKM

Fasilitasi PIRT: 125 UMKM

Fasilitasi NIB: 515 UMKM

4. Peningkatan Omzet UMKM

Pertumbuhan volume usaha koperasi dan UMKM mitra BLU di sektor riil menunjukkan hasil yang menggembirakan, meski kenaikan omzet UMKM di awal masa pandemi (2019-2020) tidak menunjukkan kenaikan akibat terhentinya aktivitas penjualan. Namun setelah itu, pertumbuhan omzet selalu menunjukkan

nilai positif dengan kenaikan berkisar antara 10 persen (tahun 2021) hingga 12,7 persen (tahun 2023).

5. UMKM Go Digital

Sejak awal pandemi di tahun 2020 hingga saat ini, jumlah UMKM yang sudah onboarding di SMESCO mencapai 101.154 UMKM (data per tanggal 1 Mei 2024).

Jumlah ini masih terus bertambah karena pendaftaran UMKM masih terus dibuka lewat laman SMESCO. Informasi mengenai jumlah dan persebaran UMKM di Indonesia bisa disimak secara live di www.smesco.go.id.

6. UMKM Siap Ekspor

Jumlah UMKM siap ekspor yang berhasil dicetak melalui program kurasi dan inkubasi SMESCO meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2023, nilai ekspor UMKM mitra sudah melebihi Rp321 ratus juta. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program dan inisiatif yang mendukung UMKM dalam mengembangkan pasar ekspor dan meningkatkan daya saing di pasar global.

SMESCO juga memiliki program Skyeats, yang merupakan penerjemahan dari program prioritas KemenKopUKM yaitu Rumah Produksi Bersama (RPB) dan SMESCO Labo, yang bisa diibaratkan sebagai pusat riset bagi UMKM.

“SMESCO Labo menyediakan fasilitas research and development yang tidak dimiliki kebanyakan UMKM, termasuk fasilitas eksplorasi model bisnis masa depan. UMKM kita perlu terus dibekali agar dapat memanfaatkan teknologi sebagai pelaku, bukan sebatas objek,” jelas Menteri Teten, yang ingin agar kemampuan inovasi pelaku koperasi dan UMKM tidak terhambat hanya karena tidak memiliki akses ke fasilitas yang diperlukan untuk berkreasi.



Pertumbuhan omzet UMKM menunjukkan nilai positif (Sumber: Dok. SMESCO)

Negara Tujuan Ekspor



Kerajinan

Australia, Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Nigeria, Afrika Selatan, Arab Saudi, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Kanada, Belgia



Produk Kulit

Hong Kong, Vietnam, Singapura, Tiongkok, Thailand, India, Jepang, South Korea, Malaysia, Taiwan, South Africa, Egypt, United Arab Emirates, Italy, USA, Germany, Norway, Spain, England, Brazil



Furnitur

Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol, Jerman, Italia, Kanada, Denmark, Swedia, Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Afrika Selatan



Makanan Kemasan

Singapura, Jepang, Malaysia, Filipina, Hong Kong, India, Kamboja, Thailand, Taiwan, Australia, Vietnam, Korea Selatan

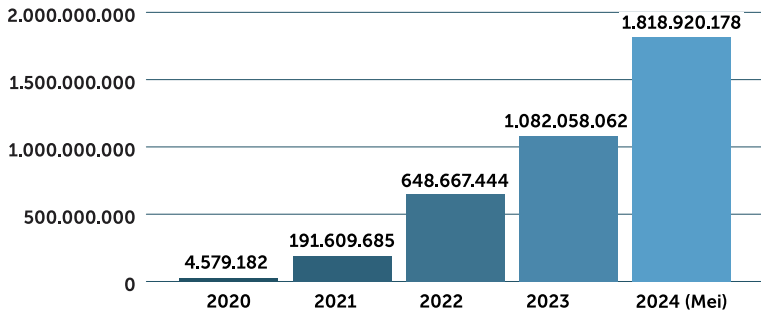


Rempah-Rempah

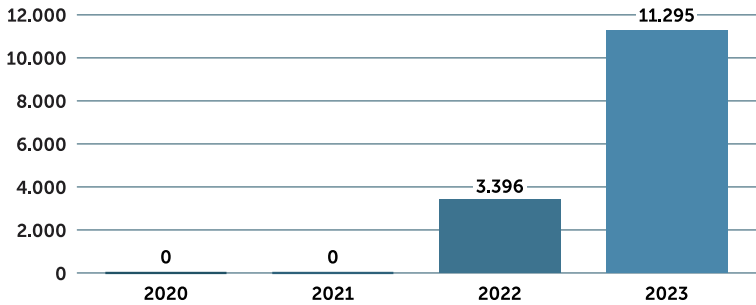
Singapura, Uni Emirat Arab, Maroko, Aljazair, Tunisia, Amerika Serikat, Belanda, Brazil, Jerman, Belgia

Sebagai BLU, capaian kinerja SMESCO selama masa kerja 2020-2024 menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin oleh sejumlah indikator berikut ini

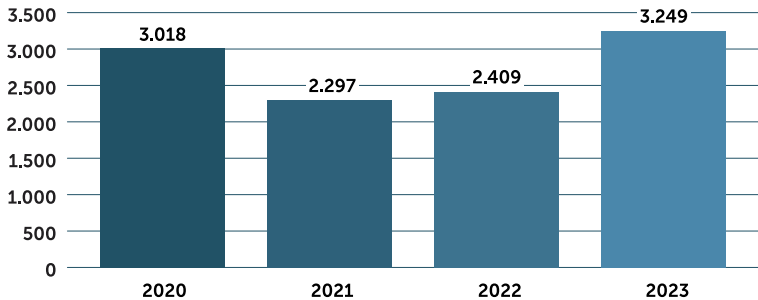
Grafik IV.2 : Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran



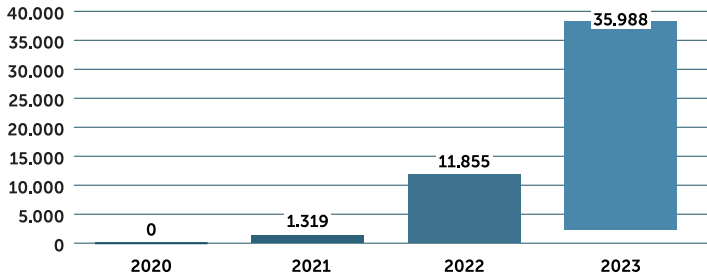
Grafik IV.3 : Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Melalui Event/Expo/Pameran



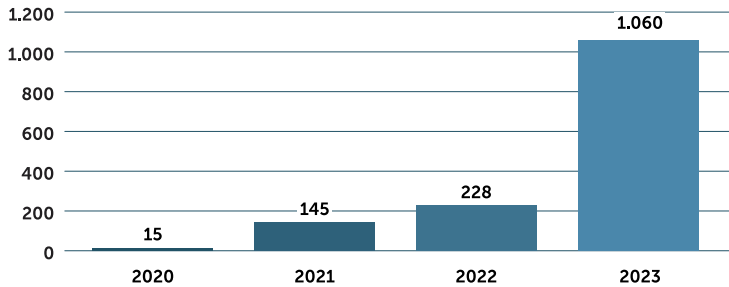
Grafik IV.4 : Jumlah UMKM yang Difasilitasi Melalui Channel Pemasaran



Grafik IV.5 : Layanan Konsultasi Pemasaran (UMKM)



Grafik IV.6 : Pendampingan dan Pelatihan UMKM (*offline*)



PERJALANAN SMESCO SELAMA PERIODE 2020-2024

SMESCO telah melalui perjalanan yang cukup menantang, terutama saat pandemi COVID 19 menerjang Indonesia. Fase-fase tersulit SMESCO telah berhasil, kini saatnya SMESCO melakukan ekspansi.

Berikut sekilas perjalanan SMESCO dari 2020-2024.

2020: Era Mitigasi

Akibat terbatasnya sumber daya dan mobilitas di masa pandemi, layanan pemasaran SMESCO hanya difokuskan pada UMKM yang teregistrasi di Paviliun Provinsi saja, dan dilakukan secara daring melalui *e-commerce*. Aktivitas-aktivitas *offline* seperti pameran dan expo, digantikan event *online* seperti webinar.



2020

2021

2022

2021: Era Kolaborasi

Masih belum terlalu bebas bergerak, namun bisnis sudah mulai berdenyut. SMESCO mulai menggiatkan kolaborasi dengan banyak pihak. Seperti dengan Bank Indonesia (BI) mendirikan Pusat Wastra Nusantara (PWN) di Lantai Dasar SME Tower Main Building. Ini adalah *hall of inspiration* produk Wastra karya UMKM berkualitas premium dan memiliki nilai kebudayaan yang luhur. Lalu bersama BNI membuka BNI Xpora sebagai Pusat Layanan Ekspor UKM dan Showcase di gedung SMESCO. Tenant ini dilengkapi *e-catalog* dan informasi digital tentang semua UMKM yang siap ekspor. Bersama BRI, SMESCO membuka BRI UKM Lounge, sedangkan kerjasama dengan JNE untuk Fulfillment Center. SMESCO juga melakukan kurasi produk melalui jaringan Accor Group Hotel dan Kimia Farma.

2022: Era Transformasi

Sumber pendapatan PNBP SMESCO yang tadinya berasal dari optimalisasi aset sudah resmi bergeser ke penjualan produk-produk UMKM. Atau dengan kata lain, SMESCO kembali ke fungsi asalnya sebagai lembaga yang melayani pemasaran produk-produk koperasi dan UMKM. Imbas pandemi juga sudah mereda di tahun 2022 sehingga aktivitas bisnis mulai pulih seperti semula.

2024

2023

2023: Era Omni

Era Omni dimaknai sebagai upaya SMESCO untuk mengintegrasikan berbagai strategi pemasaran yang tersedia bagi produk-produk UMKM, baik itu jalur pemasaran daring maupun luring. Di tahun ini juga keuangan SMESCO menunjukkan saldo positif di akhir tahun 2023. Artinya, SMESCO terbebas dari kondisi defisit keuangan yang sudah menjerat sejak tahun 2018. Ini dimungkinkan terjadi berkat optimalisasi sinergi dan kolaborasi yang dilakukan di lingkungan internal maupun eksternal SMESCO.

2024: Era Ekspansi

Selain membentuk Start-up Hub, SMESCO juga berencana membuat lebih banyak *pop up store*, dan membawa produk-produk UMKM yang tergabung di Paviliun Provinsi masuk ke beberapa pusat perbelanjaan di area Jabodetabek. “Jadi, alih-alih menunggu konsumen datang, kami pergi “menjemput bola”. Nantinya kami juga ingin memiliki *display* produk UMKM Indonesia di sejumlah negara di luar negeri, yang kami sebut sebagai konvoi produk Indonesia,” kata Wientor yang berharap tahun 2028 nanti SMESCO sudah layak disebut sebagai BLU kebanggaan negeri.



SUMMARY/RINGKASAN

INOVASI MEMBENTUK UMKM & KOPERASI MASA DEPAN

Pabrik Minyak Makan Merah Yang Mendobrak Kemapanan

5

5

Pabrik Minyak Makan Merah yang Mendobrak Kemapanan



“Idenya adalah petani sawit bisa memproduksi sampai produk hilir sehingga mereka memiliki *value*, bukan tergantung pada industri besar sebagai pemasok tandan buah segar saja. Pabrik Minyak Makan Merah ini juga bisa memperbaiki struktur produksi minyak goreng kita sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit,”

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.



Petani sawit rakyat yang jumlah arealnya lebih dari 40 persen dari total areal sawit nasional yang sebesar 14,9 juta hektar. (sumber : dok Humas KemenKopUKM)

IKUT ATASI KELANGKAAN MINYAK GORENG

Sejak tahun 1980-an, industri sawit memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit yang kian masif dimulai, dari 300 ribu hektar pada tahun 1980 saat ini mencapai 14,9 juta hektar dengan produksi 44,8 juta ton CPO atau minyak sawit mentah. Indonesia menjadi penyumbang lebih separuh dari total produksi minyak sawit dunia yang sekitar 64 juta ton. Di balik angka pertumbuhan yang fantastis itu, luas perkebunan rakyat juga terus meningkat. Luas kebun petani swadaya mencapai 41 persen atau sekitar 6,1 juta hektar. Bahkan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) menduga, luas kebun sawit rakyat sesungguhnya telah mencapai 9 juta hektar.

Kebun-kebun sawit, tanaman yang diintroduksi Belanda ke Indonesia pada tahun 1848, telah menyerap 8,2 juta tenaga kerja, 4,2 juta di antaranya adalah sawit rakyat. Tanaman yang berasal dari Afrika Barat ini telah menghidupi 1,5 juta

keluarga petani kecil dan menjadi kontributor utama ekonomi setidaknya di 31 kabupaten dan kota di Indonesia. Berbagai wilayah berkembang karena sawit, terutama di Riau, serta sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi. ⁽¹¹⁾

Berbagai capaian yang ditorehkan sawit nasional nyatanya juga menyimpan kisah ironis. Tak lain karena terpinggirkannya nasib petani swadaya. Petani hanya sebagai pemasok tandan buah segar (TBS) pabrik-pabrik kelapa sawit penghasil CPO, terutama pabrik yang tidak memiliki kebun sendiri. Namun, karena petani sawit rakyat ini umumnya adalah petani kecil yang bekerja di lahan-lahan sempit, nasib mereka pun jadi sangat rentan.

Harga hasil panen mereka tidak serta merta mengikuti fluktuasi kenaikan harga CPO dunia, tetapi ketika harga CPO dunia anjlok, harga TBS mereka langsung ikut jatuh.



Bukan hanya itu, rantai pasok yang harus mereka lalui dari kebun hingga ke pabrik sangat panjang dan berliku, yang di setiap mata rantai ada pengambilan marjin sehingga harga di tingkat petani jadi rendah. Dari studi Kehati 2019, rantai pasok petani sawit swadaya adalah dari kebun hingga PKS. Secara sederhana, ada empat tahap yang dilalui sawit petani ini yaitu petani ke pengumpul, pemegang *delivery order* (DO) pabrik dan pabrik kelapa sawit (PKS). Dari sini terlihat, rantai pasok yang harus dijalani petani swadaya jauh lebih panjang, karena banyak aktor yang ikut terlibat. Menurut data dari APKASINDO, seperti yang dikutip dari Laporan Akhir Kajian Pengembangan Minyak Makan Merah Terintegrasi Berbasis Koperasi, KemenKopUKM, harga TBS yang diterima

oleh petani swadaya hanya sekitar 60-70 persen dari harga petani sawit plasma atau harga referensi TBS yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS tingkat provinsi.

Karakteristik industri sawit yang membutuhkan modal besar juga membuat petani kecil kian tersudut. Modal untuk memelihara tanaman sawit juga besar, untuk pemilihan bibit, pemupukan, pengairan, hingga perlakuan saat panen. Diperkirakan, investasi yang harus dikeluarkan sampai tanaman bisa dipanen per hektarnya mencapai 80-90 juta rupiah. Ini baru di bagian hulu.

(Susanto & Gunarso, 2020).

Sementara, di bagian hilir, karena berbeda dengan minyak kelapa yang bisa dilakukan di skala rumahan, pengolahan sawit menjadi produk hilir harus dilakukan di PKS (pabrik kelapa sawit) dan industri *refinery* yang memiliki kapasitas besar.



Sumber sawit yang diolah PKS terdiri dari tiga jalur yaitu hasil panen kebunnya sendiri, dari petani plasma binaannya, atau dari petani swadaya.

Petani sawit selain menjadi produsen juga menjadi konsumen hasil hilir industri sawit, yaitu minyak goreng sawit. Karena itu, ketika krisis minyak goreng terjadi, para penghasil buah sawit ini juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng untuk memasak. Krisis minyak goreng yang memicu keresahan masyarakat terjadi pada 2021 hingga 2022 lalu.

Kala itu, sejak Oktober 2021, harga minyak goreng di pasaran meningkat tajam. Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga minyak goreng curah sebelum Oktober berkisar di harga tertinggi Rp16.650 per kilogram, naik menjadi Rp18.900 per kilogram. Harga itu kian melonjak memasuki tahun 2022. Pada Januari 2022 harga minyak curah mencapai Rp21.650 per kilogram. Minyak goreng bermerek harganya lebih mahal lagi. ⁽¹²⁾





Peresmian Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau yang dikelola Koperasi Pujakesuma pada 14 Maret 2024. Foto: Humas KemenKopUKM

Krisis minyak goreng waktu itu disebabkan karena harga CPO di pasar internasional yang melambung tinggi, berdasar data Harga Komoditas Bank Dunia, harga minyak sawit dunia pada tahun 2021 adalah 1.131 dollar AS per ton dan menjadi 1.276 dollar AS per ton pada tahun 2022. Hal ini yang membuat pengusaha lebih memilih ekspor CPO ketimbang menjualnya di dalam negeri. Menurut Menteri Teten dalam diskusi internal pada 4 Juni 2024 di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, tak terkendalinya harga minyak goreng dan bahkan kemudian mulai menghilang dari pasar saat itu membuat Presiden sangat gusar dan dengan tegas meminta semua menteri mencari solusi.

Setelah terkoneksi dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengembangkan teknologi yang bisa membuat CPO menjadi *red palm oil* atau minyak makan merah dalam skala kecil tetapi tetap masuk dalam skala ekonomi, Menteri Teten Masduki merasa minyak makan merah ini bisa menjadi solusi atas kelangkaan minyak goreng. Yang lebih penting lagi, petani tidak harus menjual TBS-nya ke industri tetapi bisa mengolah sendiri.

Teknologi pabrik minyak makan merah ini merupakan rekonfigurasi teknologi *refining*. Berbeda dengan tahapan rafinasi pada minyak goreng sawit konvensional yang dalam prosesnya membuang

senyawa fitonutrien alami, tetapi dalam teknologi yang diinovasi PPKS ini adalah mempertahankan sebanyak mungkin fitonutrien dalam produk akhir. Jadi, sumber vitamin A dan vitamin E yang secara alami ada dalam minyak sawit dan selama ini dibuang sia-sia dalam proses pengolahan minyak sawit menjadi minyak goreng demi mendapatkan minyak goreng berwarna kuning keemasan, kini bisa dipertahankan dan membuat minyak makan merah sebagai sumber nutrisi.

“Waktu itu, Presiden bertanya, apakah produknya bisa laku? Menurut saya, pasti akan laku, karena pabriknya terintegrasi, yaitu letaknya berdekatan dengan kebun sawitnya, dan konsumennya juga di kecamatan sekitarnya. Karena itu, harganya bisa dipastikan bisa lebih murah,”

papar Menteri Teten Masduki pada 4 Juni 2024.



Pabrik minyak makan merah sebagai proyek percontohan. (Foto: Musa Sanjaya)

Kemudian, pada 18 Juni 2022, setelah Presiden berkunjung ke PPKS Medan untuk melihat teknologinya, pemerintah menetapkan pembangunan pabrik minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan minyak makan merah (*red palm oil/RPO*) mini berbasis koperasi. “Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, petani swadaya,” kata Menteri Teten Masduki sesuai rapat terbatas yang dipimpin Presiden dalam siaran pers seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Menteri Teten meyakini petani bisa diandalkan sebagai pemasok bahan baku. Pasaunya, bila dilihat dari luas lahan kebun sawit milik petani, ada 41 persen lebih dari total lahan areal sawit nasional yang sebesar 14,59 juta hektar. Artinya, ada enam juta hektar lebih areal kebun sawit milik rakyat.

Pada 14 Maret 2024, Presiden Joko Widodo pun meresmikan Pabrik Percontohan Minyak Makan Merah Pagar Merbau yang terletak di Deli Serdang, Sumatra Utara. Kapasitas pabrik ini adalah 10 ton CPO per hari dengan target menghasilkan 7,8 ton minyak makan merah per hari. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan kehadiran pabrik ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi petani sawit, terutama yang sudah berbentuk koperasi.

Pabrik yang lokasinya berada di wilayah Regional PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I (sebelum *merger* merupakan wilayah kerja PTPN II), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang merupakan salah satu anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara, sebagai perancang dan membangun pabrik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai pemberi dana pembangunan pabrik dengan pengelola pabrik adalah Koperasi Pujakesuma. Untuk dana operasional, koperasi bisa meminjam dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDP), salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Koperasi dan UKM.

Keberadaan pabrik ini, Presiden berharap,

harga tandan buah segar/TBS di petani tidak naik turun karena semua akan diolah menjadi minyak makan merah. Dan ini adalah wujud nyata untuk mengikutsertakan petani dalam hilirisasi produk sawit, yang selama ini hanya dinikmati pemilik modal besar. “Jangan jual TBS, jangan jual CPO, kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini, ini bagus sekali,”

kata Presiden dalam pidatonya seperti dikutip dari setneg.go.id.





1 Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)

Provider Teknologi, DED, Izin Edar Prduk (SNI dan BPOM) dan Pengawasan Mutu

2 Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)

Regulator dan Pemberian Izin untuk operator Pabrik Minyak Makan Merah

3 Holding PTPN

Fasilitator penyedia sumber bahan baku (CPO), air, energi listrik, dan lahan

4 BDPKKS

Pembiayaan investasi pabrik dalam bentuk hibah

5 BPOM dan BSN

Pengawasan penerbitan izin edar dan standar nasional minyak makan merah

6 LPDB

Pinjaman Pembiayaan untuk operasional Pabrik Minyak Makan Merah, dengan jasa 5%

7a Koperasi

Operator dan penjualan Minyak Makan Merah, stearin, dan sabun secara langsung

7b ITSI & Instiper

Penyediaan SDM untuk Pabrik Minyak Makan Merah

8 Bank Mandiri

Program "PROMANDIRI" Pembiayaan untuk distributor/pemasaran produk (asuransi usaha)

9 UGM dan USU

Edukasi pasar/Rekayasa sosial untuk sosialisasi produk pabrik Minyak Makan Merah



Tandan buah segar (TBS) sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pagar Merbau milik PTPN II Pagar Merbau, Deli Serdang. (Foto: Musa Sanjaya)

KOPERASI DALAM HILIRISASI SAWIT

Menghadirkan koperasi petani sawit yang bisa mengintegrasikan bagian hulu hingga hilir sawit rakyat tentu akan memperkuat posisi petani sawit dan memberikan manfaat yang lebih. Untuk mewujudkan keberadaan Pabrik Minyak Makan Merah yang operasionalnya dijalankan koperasi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM bernomor 5/2023 mengenai Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi pada 13 Maret 2023. Aturan yang memuat 21 pasal ini sekaligus menjadi payung hukum pendanaan tiga pabrik minyak makan merah sebagai *piloting project* yang berada di Sumatra Utara.

Lokasi ketiga pabrik itu berada di lahan milik PTPN I (Persero) dan PTPN IV. Ketiganya adalah di Pagar Merbau, Deli Serdang yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2024 lalu, pabrik di Langkat, dan Asahan. Sedangkan koperasi pengelolanya adalah Koperasi Pujakesuma untuk pabrik Deli Serdang, Koperasi Sawit Unggul Sejahtera untuk pabrik di Kabupaten Langkat dan Koperasi Petani Indonesia Bukit Kijang untuk pabrik di Kabupaten Asahan.

Model bisnis yang dikembangkan untuk pabrik minyak makan merah terintegrasi berbasis koperasi ini memiliki komponen sebagai berikut:

1. Perkebunan sawit rakyat dengan luas kebun sekitar 1.000 hektar yang menghasilkan TBS. Petani sawit membentuk dan/atau menjadi anggota koperasi.
2. Petani sawit melalui koperasi mengembangkan unit usaha pengolahan TBS menjadi CPO dan produk samping/by product (CPO Mill/PKS) yang terintegrasi dengan Pabrik Minyak Makan Merah (M3) yang berkapasitas 10 ton per hari. Unit usaha lainnya yang menghasilkan produk samping dan/ atau produk turunan (*derived product*) serta unit usaha pemasaran produk antara dan atau produk akhir.
3. Koperasi dijalankan oleh suatu manajemen profesional, sementara dewan pengawas merupakan perwakilan dari anggota koperasi (petani sawit)
4. Masing-masing petani sawit anggota koperasi mengelola kebun sawitnya. Melalui unit-unit usaha koperasi (CPO Mill dan Pabrik Minyak Makan Merah), TBS petani sawit anggota koperasi diolah untuk menghasilkan minyak makan merah, produk samping, dan/atau produk turunan. Unit usaha koperasi juga memasarkan produk-produk hilir tersebut.
5. Petani sawit tidak menjual TBS ke koperasi. Nilai TBS petani didasarkan pada nilai penjualan produk akhir (setelah dikurangi biaya pengolahan) yang proporsional dengan volume TBS yang masuk ke koperasi.



Sedangkan skema bisnis yang bisa diadopsi untuk Pabrik Minyak Makan Merah Terintegrasi Berbasis Koperasi ada tiga:

Pola 1

- Koperasi memiliki minimal 1,000 hektar perkebunan sawit sebagai titik awal pengembangan.
- Koperasi membangun *CPO Mill/ PKS* lebih dahulu
- Kemudian membangun Pabrik Minyak Makan Merah ini adalah pola Ideal dari hulu ke hilir

Pola 2

- Koperasi memiliki kebun sawit seluas 1.000 hektar
- Koperasi membangun pabrik Minyak Makan Merah
- Setelahnya membangun *CPO Mill/ PKS*.

Sebelum memiliki PKS, koperasi dapat melakukan titip olah TBS dahulu pada PKS terdekat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pola ini adalah perlu adanya kesepakatan persepsi rendemen TBS, inti dan cangkang sawit dapat mempengaruhi biaya titip olah dan perlu rincian komponen biaya yang dibebankan pada biaya titip olah.

Pola 3

- Koperasi langsung membeli CPO
- CPO diolah di Pabrik Minyak Makan Merah miliknya

Pola ini memotong dua proses awal. Tantangan dari pola ini adalah harga CPO yang sangat fluktuatif bisa mempengaruhi keberlanjutan bisnis minyak makan merah dan yang pasti, kurang tepat sasaran bila dilihat dari konsep awal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Untuk Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau, model bisnis yang digunakan adalah pola dua, atau titip olah. "Petani-petani sawit yang menjadi anggota Koperasi Pujakusuma terdiri dari 328 orang dan total lahan kami sekitar 1600-an hektar. Inilah yang diharapkan menjadi penopang bahan baku dari pabrik minyak makan merah Pagar Merbau," kata Oktrigana Wirian, Direktur Koperasi Pujakesuma.

MENYELESAIKAN MASALAH HULU UNTUK KEBERHASILAN HILIR

Masalah rendemen sawit memang berkorelasi linier dengan keberhasilan program Minyak Makan Merah. Rendemen adalah persentase perolehan minyak sawit dari pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit mentah (CPO) di pabrik kelapa sawit. Rendahnya rendemen bisa menjadi gambaran persoalan di hulu, *on farm*, yaitu produktivitas sawit petani yang masih terbilang rendah. Memang, bila melihat pencapaian luas areal kebun sawit, memang sangat fenomenal. Namun, secara produktivitas minyak sawit Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia, meski luasan kebunnya lebih besar.

Keunggulan luas lahan kelapa sawit di Indonesia tidak diimbangi dengan produktivitas lahan yang baik. Malaysia memiliki produktivitas lahan sebesar 3,96 ton/ha/tahun, sedangkan Indonesia hanya memiliki produktivitas sebesar 2,70 ton/ha/tahun.⁽¹³⁾Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya produktivitas sawit Malaysia, tetapi pengaruh terbesar adalah karena produktivitas sawit petani. Per hektar, kebun sawit rakyat kita hanya menghasilkan 2 ton CPO per tahun, jauh di bawah hasil kebun sawit swasta



Menteri Teten Masduki saat bertemu dengan perwakilan petani sawit yang tergabung dalam koperasi. (Sumber: dok Humas KemenKopUKM)



Minyak makan merah memiliki warna yang menyolok yang berasal dari warna sawit yang merah tua. Telah melalui uji klinis, izin edar dari BPOM, sertifikasi SNI hingga halal. Foto diambil pada Kamis (14/3/2024) di Deli Serdang, Sumatera Utara. (Sumber: Dok. KemenKopUKM)

yang mampu mencapai 4-8 ton per hektar per tahun. Rendahnya hasil ini karena orientasi petani mandiri/swadaya lebih bagaimana bisa cepat menghasilkan uang, namun tidak diimbangi dengan sistem tanam yang memadai. ⁽¹⁴⁾

Meski pohon sawit bisa tumbuh dengan sangat baik di Indonesia, bahkan ketimbang daerah asalnya di Afrika Barat, namun agar hasilnya maksimal tanaman sawit harus dikelola dengan standar *good agricultural practices* atau teknik budidaya yang baik yang meliputi aspek lahan, benih, penanaman, pemeliharaan hingga cara panen tandan buah segarnya.

Dari persoalan bibit ini yang kemudian mempengaruhi produktivitas sawit.

“Bila ingin rendemen sawitnya tinggi, petani harus menanam bibit yang unggul, bukan bibit palsu,”

kata Bagus Giri, Peneliti PPKS Medan.

Di Indonesia ada dua jenis sawit yang ditanam secara komersial yaitu jenis dura dan tenera. Dura adalah tanaman sawit yang dibawa Belanda ketika pertama kali mengenalkan tanaman ini ke Hindia Belanda. Sedangkan tenera adalah jenis sawit unggul, hasil persilangan dura dengan pisifera (jenis sawit yang bunga betinanya mandul).

Bibit palsu atau bibit ilegal memang banyak beredar di pasaran, yaitu bibit yang tidak melalui proses sertifikasi dan syarat-syarat serta tata cara produksinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Proses membuat kecambah kelapa sawit unggul untuk dijadikan bibit itu melalui proses yang panjang. Karena perlu perkawinan silang antara betina dura dan jantan pisifera yang serbuknya harus diproses di laboratorium. Sementara, yang banyak beredar bibit ilegal bisa saja dari buah sawit yang jatuh ke tanah dan tumbuh bertunas. Bibit yang demikian bisa dipastikan itu dari jenis dura, yang pada akhirnya berpengaruh pada produktivitas sawit.

Karena itu, Frisda R. Panjaitan, peneliti PPKS, Medan juga menekankan, ketika bicara produktivitas di hilir, dalam hal ini hasil minyak makan merah, harus betul-betul memperhatikan apa yang di hulu. Selain soal bibit, juga untuk pemupukan. Tanaman yang kurang pupuk, akan menghasilkan buah-buah sawit yang kecil-kecil. Terlebih ketika dipanen saat belum matang, karena alasan butuh uang, masih mentah sudah dipanen. Hal-hal demikian yang membuat rendemen sawit petani jadi rendah, bahkan bisa lebih rendah dari 16 persen.

Itu baru di tahap pabrik pengolahan untuk menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO. Sementara, di tahap selanjutnya, rendemen minyak makan merah dipengaruhi oleh keberadaan asam lemak bebas (ABL) dan DOBI (*deterioration of bleachability index*). Keduanya menjadi standar untuk melihat mutu CPO. ABL standar ada di angka 3. Semakin ABL tinggi, rendemen minyak makan merah akan semakin turun. Standar DOBI yang baik minimal di angka 2,32. Sementara, dari kajian PPKS rata-rata DOBI minyak sawit mentah Indonesia masih rendah, yaitu kisaran 0,4 -2,9⁽¹⁵⁾.

“Masalahnya, di lapangan, ABL yang ada di CPO melonjak bahkan sampai angka 5, 6 bahkan 7. Sebetulnya ini tidak layak, bukan tidak layak, tapi bisa jadi pengurang dari minyaknya atau rendemennya rendah,”

ujar Frisda. Pada penelitian di laboratorium, tim peneliti PPKS menggunakan CPO dengan nilai ABL 3, atau nilai standar yang baik.

Untuk mendapatkan ABL 3 membutuhkan kematangan buah yang pas, sehingga akan didapat *olein* (fraksi cair) sebesar 78 persen. Sementara, fraksi *stearin* (fraksi padat) tidak dipakai untuk mendapatkan minyak makan merah. Bila komposisi di bawah standar, *olein* yang didapat bisa hanya sebesar 72 persen. Ujungnya bisa ditebak, sawit petani akan ditaksasi rendah.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui, memang masih ada keresahan di bawah, termasuk kekhawatiran, petani anggota koperasi lebih memilih menjual ke pabrik besar alih-alih memasok hasil panennya ke Pabrik Minyak Makan Merah. Namun, Menteri Teten tidak khawatir sawit petani akan disedot ke pabrik-pabrik kelapa sawit swasta besar, dengan catatan pabrik besar tidak diberi izin untuk ikut serta dalam produksi minyak makan merah. “Kalau swasta besar dikasih izin, bisa benar-benar habis bahan bakunya.”

“Menurut saya, perlindungannya kira-kira harus seperti itu, tidak boleh ada yang *gede* masuk ke sini,” tegas Menteri Teten. Karena, ke depan, minyak makan merah ini sangat potensial untuk bisa berkembang pesat. “Sudah ada permintaan akan minyak makan merah dari Malaysia, juga dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sebesar 200 ton per bulan,”

kata Menteri Teten pada 4 Juni 2024.

Saat ini karena teknologi hasil inovasi dalam negeri yaitu dari PPKS dengan pendanaan BPDPKS, masih diuji coba, sehingga memerlukan proses untuk bisa sampai ke kondisi ideal di lapangan. Namun, Menteri Teten juga menyampaikan, China juga memiliki teknologi baru yang bisa digunakan. “Tapi intinya adalah ini ide bahwa petani boleh memproduksi sampai produk hilir sehingga punya *value* dan tidak tergantung kepada industri besar, tidak hanya bisa menjual TBS saja. Struktur akan diperbaiki supaya kelak masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya,” tegas Menteri Teten Masduki.

Sementara itu, menurut Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Kementerian Koperasi dan UKM Bagus Rachman, keberadaan pabrik minyak makan merah ini setidaknya ada dua hal yang terkonfirmasi. “Pertama, rekonfigurasi teknologi minyak makan merah ini dari skala laboratorium berhasil diterapkan untuk pabrik dengan kapasitas 10 ton CPO per hari dan yang kedua, produk minyak makan merah terbukti adalah minyak sehat,” ujar Bagus Rachman pada kunjungan kerja ke Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau, pada 21 Mei 2024.

Memang, saat ini kelangkaan minyak goreng bukan lagi isu, namun keberadaan minyak makan merah ini bisa dipandang sebagai bagian dari transformasi sistem ketahanan pangan untuk 2045. “Karena, untuk sampai pada Indonesia Emas 2045, dari hulu hingga meja makan kita, konsepnya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang sehat,” pungkas Bagus Rachman.

Daftar Pustaka

1. <https://setkab.go.id/pembukaan-bri-microfinance-outlook-2024-di-ball-room-menara-brilian-di-kota-administrasi-jakarta-selatan-provinsi-dki-jakarta-7-maret-2024/>
2. Profil Debitur Kredit Usaha Rakyat, Working Paper Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2015
3. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/11/30/sekitar-1-juta-petani-dan-nelayan-berkurang-di-2030>
4. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240205100919-4-511871/catatan-lpem-ui-ri-kena-gejala-deindustrialisasi-di-era-jokowi>
5. <https://peluangnews.id/gelar-rakor-kemenkopukm-komitmen-kembangkan-koperasi-dan-umkm-di-biak-numfor/>
6. <https://www.topbusiness.id/41331/koperasi-pangan-akan-dibuat-model-korporasi.html>
7. <https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warnings-acute-food-insecurity-june-september-2022>
8. Databoks, 08/05/2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/08/jumlah-wirusaha-di-indonesia-awal-2024-mayoritas-pemula>
9. <https://ehub.kemenkopukm.go.id/news/43-persen-mahasiswa-ipb-ingin-wirusaha>
10. <https://dailysocial.id/post/msme-empowerment-report-2022>
11. <https://binasawitmakmur.com/berita/kelapa-sawit-indonesia-semakin-menjadi-andalan-ekonomi-nasional>
12. Informasi harga Pangan Antar Daerah, <https://www.bi.go.id/hargapangan>
13. Sukirno, S., & Romdhon, M. M. (2020). Analisis Daya Saing Komparatif CPO Indonesia di Negara Tujuan Utama (Comparative Advantage of Indonesian's Crude Palm Oil (CPO) in Main Destination Countries). *Jurnal Ilmiah Management Agribisnis (Jimanggis)*, 1(1), 1-8.

14. Susanto, A.B, Gunarso, Petrus, 2020, Sawit Untuk Negeri
15. Karakteristik CPO Indonesia, Siahaan dkk (2008)
16. <https://pis.iopri.co.id/upload/wartaIOPRI/files/230823105337.pdf>

Glosarium

Agregasi

Pengumpulan sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu

Agro ekosistem

Sistem yang diterapkan untuk memajukan pertanian

Aplikasi Mypertamina

Aplikasi ini memudahkan konsumen mendapatkan produk Pertamina di mana saja dan kapan saja. Dengan fitur-fitur canggihnya, MyPertamina for Business memungkinkan konsumen industri untuk melakukan transaksi pelayanan dengan mudah dan cepat.

ALB

Asam Lemak Bebas, asam yang dibebaskan pada hidrolisa lemak. Adanya ALB ini menjadi parameter kualitas CPO.

Atsiri

minyak yang terdapat pada tumbuhan aromatik, mudah menguap, digunakan dalam minyak wangi, bumbu, dan obat-obatan.

Blockchain

Teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terdesentralisasi, aman, transparan, dan tidak dapat diubah

BPDPKS

Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Lembaga pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

CPO

Crude Palm Oil, disebut juga minyak kelapa sawit yang merupakan minyak nabati edibel yang didapatkan dari mesocarp (daging) buah kelapa sawit. CPO secara alami berwarna merah karena mengandung karoten yang tinggi.

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Digitalisasi koperasi

Transisi dari sistem koperasi konvensional ke *platform* digital.

Dutch Disease

Istilah untuk menggambarkan pelemahan sektor manufaktur

Entrepreneur hub

Platform ekosistem wirausaha Indonesia yang mengintegrasikan berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan serta pelaku UMKM.

FPO

Farmer producers organisations dalam bahasa Indonesia disebut organisasi petani produser. Koperasi atau petani tidak bergerak sendiri, melainkan melibatkan pemangku kepentingan seperti pabrik atau koperasi besar, pemerintah dan bank sebagai penyalur dana atau pemberi modal.

Hilirisasi

tahap pengolahan produk dari bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi dan siap dijual kepada konsumen akhir. Proses ini melibatkan pemrosesan, pengemasan, distribusi, dan penjualan produk.

Kakao

pohon coklat, bijinya dibuat bubuk untuk minuman dan sebagainya

Korporatisasi Petani

Mendorong penerapan pengelolaan pertanian secara korporat (perusahaan).

Lembaga Inkubator

lembaga atau organisasi yang dirancang untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan bisnis baru atau *startup*.

LPDB-UMKM

Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah lembaga yang memberikan layanan pinjaman/ pembiayaan kepada koperasi UMKM serta menjadi integrator dan percepatan pengembangan industri keuangan mikro di daerah.

Koperasi

perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung)

Koperasi produksi

koperasi yang membuat barang dan dijual bersama-sama.

Offtaker

pemasok kebutuhan industri maupun pasar.

Pilot Project

adalah sebuah studi kecil yang dilakukan sebelum mengimplementasikan suatu

Glosarium

produk atau proses secara keseluruhan.

PKS

Pabrik Kelapa Sawit, pabrik yang mengolah buah kelapa sawit menjadi produk turunan seperti CPO/minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, lemak kelapa sawit, dll.

RPB

Rumah Produksi Bersama, program inovasi yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM

Rantai pasok

aktivitas-aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi produk atau jasa dari suatu perusahaan ke konsumen akhir.

Startup

Perusahaan yang baru dibentuk dan sedang dalam fase pengembangan dan operasional.

Tengkulak

Pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).

UMKM

usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai.

Kecil tapi besar, seperti itulah peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia selama ini. Jumlahnya yang kurang lebih 65 juta, dan berkontribusi terhadap PDB kita sebesar 61 persen, UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. Sebuah angka yang juga yang sangat besar. Sayangnya, UMKM kita tidak terkoneksi dengan industri, alias mandiri. Kondisi ini menciptakan UMKM yang tidak produktif dan tidak bisa sustain.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan berbagai inovasi untuk menjadikan UMKM terkoneksi dengan industri. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain memodernisasi koperasi, meningkatkan kapasitas usaha dan pembiayaan, serta menciptakan peluang usaha dan *startup*.

Gagasan sekaligus implementasi dari program-program KemenKopUKM selama 5 tahun, tertuang dalam serial buku bertema Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM. Diawali oleh buku seri 1 ini, yang menjadi pengantar untuk buku seri selanjutnya.



ISBN 978-623-89357-0-3
ISBN 978-623-89357-1-0 (PDF)

